

Ekonomi Makro

Buku ini memberikan dasar pemahaman Ekonomi Makro bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin mempelajari bidang ini secara komprehensif.

Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas di Indonesia

ISBN 978-602-72602-1-4



9 786027 260214

Ekonomi Makro

Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D

Ekonomi Makro

Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D



Diterbitkan Oleh:
CV. IRDH (Research & Publishing) Anggota IKAPI
Office: Jl. A Yani Gg. Sokajaya 59 Purwokerto
Telp: 0281-7639218 HP 082227031913
www.irdhresearch.com email:irdhresearch@gmail.com

EKONOMI MAKRO

Penulis:

Cakti Indra Gunawan, S.E., M.M., Ph.D.

International Research and Development for Human Beings

Malang

2015

EKONOMI MAKRO

Penulis : Cakti Indra Gunawan, S.E., M.M., Ph.D.
ISBN : 978-602-72602-1-4
Editor : Juwita Purnami Restu Suwondo, S.E., M.B.A.
Penyunting : Budi Candra Dharmawan, M.Si.
Cover dan Layout : Muhammad Fakri, M.S., S.E.

Cetakan Pertama, Mei 2015
Jumlah Halaman, vi+132; 18,2 x 25,7 cm

Diterbitkan oleh:



CV. IRDH (Research & Publishing) Anggota IKAPI
Office: Jl. A Yani Gg. Sokajaya 59 Purwokerto
New Villa Bukit Sengkaling Blok C9 No. 1 Malang
HP. 082227031919 WA. 089621424412
www.irdhresearch.com | email: irdhresearch@gmail.com
www.irdhbook.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala karunia, berkah dan rahmat-Nya yang telah, sedang dan akan diberikan kepada penulis. Buku ini diproyeksikan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ekonomi Makro pada Fakultas Ekonomi maupun Fakultas lainnya yang belajar di bidang ini. Selanjutnya, buku ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi di Indonesia, dan mungkin dapat dijadikan salah satu *Guidance in Economic Policy* bagi pengambil kebijakan di jajaran pemerintahan.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Wani Hadi Utomo, Rektor Universitas Tribhuwana (UNITRI); Dr. Ir. Suumarno, MMA. Dekan Fakultas Ekonomi UNITRI; Dr. M. Rifai, SE,MM (Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3); Drs, Hamung Tukidjan, Drs. Subiyanto, MMA dan Drs. Hari Purnomo, MSi, Ak (Mantan Dekan FE UNITRI); Dr. Nur Ida Iriani, MM. Ketua Program Studi (KPS) Manajemen FE UNITRI; Ahmad Mukoffi, SE., MSi, Ak KPS Akuntansi FE UNITRI; Dr. Ir. Eko Marhaeniyanto, MP, Ketua Biro Akademik UNITRI; Alm Prof. HMS Idrus, SE., MEc., Ph.D Guru Besar FE Manajemen Universitas Brawijaya sekaligus pembimbing S1 dan S2 serta orang yang sangat berarti dalam kesuksesan studi dan merekomendasikan studi di Negeri Kanguru.

Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kolega dan guru besar di berbagai negara antara lain: Pembimbing *Doctoral Degree* dan “Ibu Ilmu Pengetahan” bagi penulis, Prof. Amarjit Kaur FASSA, Guru Besar *Emeritus School of Business*, The University of New England;

Dr. Zifirdaus Adnan, BA., MA Ketua Program Studi Applied Lingusitic and Social Culture, The University of New England, The University of Grifith; Assoc. Prof. Lindsley Miller, University of Hongkong; Prof. James W. Chapman, Massey University - The Unversity of New Zealand; Prof. Dr. Andanastuti Mukhtar, University Kebangsaan Malaysia and Post Graduate Program in Germany; Paul Kitizak, MA Thailand; Michael Dawanincura, Australia; Sam Li, The University of Beijing; dan masih banyak kawan dan kolega lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini.

Penulis tidak lupa mengucapkan kepada mahasiswa-mahasiswa penulis antara lain Hogen, Angga, Novi Hamdani, Bayu Febri Basudewo, Sulfius, Maria Anita, Kakdhe, Slamet Supriyadi, Tri Utami, Beatrix, Melki, Lisa, Flagia Denata., Yason, Vincensius, Evi Cornelia, Asmara, Arin, Maximus Rejeki, Cici, Wandra, Luthfi, Yuliana, dan khususnya kepada Desi Nia Lika sebagai motivator dalam pembuatan buku ini; serta mahasiswa lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan praktisi pemerintahan dan bisnis di Indonesia serta semoga bisa diproyeksikan untuk kemanfaatan di tingkatan internasional, aamiin.

Malang, 10 Mei 2015

Penulis,

Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D

NIDN. 071405710

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

BAB I DASAR MAKRO EKONOMI

1.1 Batasan Ekonomi Makro	1
1.2 Kaitan Antara Ekonomi Makro dengan Ilmu Ekonomi.....	2
1. Pendekatan Pengeluaran	2
2. Pendekatan Penerimaan	5
1.3 Variabel yang Dipelajari dalam Ekonomi Makro.....	7
1. Kebijakan Moneter	7
2. Kebijaksanaan Moneter di Negara Sedang berkembang	10
3. Kebijakan Fiskal	11

BAB II KONSEP DASAR PENDAPATAN NASIONAL

2.1 Pengertian Pendapatan Nasional	14
2.2 Konsep Pendapatan Nasional	14
2.3 Kegunaan Statistik Pendapatan Nasional	16
2.4 Metode Perhitungan Pendapatan Nasional	17
2.5 Masalah Dan Keterbatasan Perhitungan PDB	22

BAB III EKONOMI DUA SEKTOR

3.1 Perekonomian Dua Sektor	27
3.2 Hubungan antara Konsumsi dan Pendapatan	28
3.3 Kecondongan Mengkonsumsi dan Menabung	30
3.4 Kecondongan Menabung Marjinal	32

3.5 Fungsi Konsumsi dan Tabungan	35
3.6 Investasi (Penanaman Modal)	37
3.7 Penentuan Tingkat Kegiatan Ekonomi	38
3.8 Keseimbangan Perekonomian Indonesia.....	39

BAB IV PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR

4.1 Pengertian Sistem Perekonomian Tiga Sektor	42
4.2 Peranan pemerintah dalam perekonomian 3 Sektor	43
4.3 Kebijakan Moneter Dan Fiskal.....	43
4.4 Aliran Pendapatan Dan Syarat Keseimbangan.....	44
4.5 Jenis Pajak	47
4.6 Efek Pajak Terhadap Konsumsi Dan Tabungan.....	51
4.7 Multiplier Dalam Perekonomian Tiga Sektor	53
4.8 Masalah Makroekonomi Dan Kebijakan Fiskal	54

BAB V PEREKONOMIAN EMPAT SEKTOR

5.1 Analisis Perekonomian Empat Sektor	56
5.2 Sirkulasi Aliran Pendapatan	59
5.3 Keseimbangan Pendapatan Nasional.....	60
5.4 Multiplier Dalam Perekonomian Terbuka.....	66
5.5 Penghitungan Secara Aljabar.....	67

BAB VI TEORI KONSUMSI DAN INVESTASI

6.1 Teori Konsumsi	69
6.2 Pengertian Fungsi Konsumsi	77
6.3 Kecenderungan Mengkonsumsi (<i>Propensity to Consume</i>)	77
6.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi	79

6.5 Teori Investasi	81
6.6 Macam-macam Investasi dalam Ekonomi Makro	84
6.7 Nilai Waktu dari Uang.....	85
6.8 Kriteria Investasi.....	86
6.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Investasi	87

BAB VII TEORI IS – LM

7.1 Asumsi Dan Kegunaan	89
7.2 Pasar Barang: Kurva IS-LM	90
7.3 Kurva IS Hipotetik Perekonomian Indonesia	93
7.4 Pasar Uang.....	95
7.5 Kurva LM Hipotetik Perekonomian Indonesia	96
7.6 Pasar uang Kurva LM.....	99
7.7 Penawaran Agregatif	99

BAB VIII APBN DAN APBD

8.1 Pengertian dari APBD & APBN	102
8.2 Dasar hukum.....	103
8.3 Fungsi dari APBN	105
8.4 Penyusunan APBD	107
8.5 Komposisi APBD	108
8.6 Prinsip APBD & APBN	108
8.7 Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah.....	112
8.8 Kebijakan Fiskal Nasional.....	112
8.9 Tujuan dari APBN & APBD	113
8.10 Contoh Masalah APBN & APBD di Indonesia tahun 2011..	114
DAFTAR PUSTAKA.....	121

GLOSARIUM	123
INDEKS	126
BIODATA PENULIS.....	131

BAB I

DASAR MAKRO EKONOMI

1.1 Batasan Ekonomi Makro

Ilmu Ekonomi Makro adalah studi tentang perilaku ekonomi agregat. Disini akan dibahas tentang analisa determinan-determinan perekonomian yang pokok yaitu tingkat pendapatan, tingkat harga umum, dan pertumbuhan pendapatan.

Ekonomi makro dilain pihak berusaha melihat, melalui teleskop yang terbalik, perilaku rumah tangga individu dan perusahaan secara menyeluruh dengan tujuan lebih memusatkan gambaran tersebut agar hal-hal yang kecil dan tidak esensial dapat dihilangkan. Kalau ekonomi mikro membahas tentang konsumen, maka konsumen dalam ekonomi makro adalah keseluruhan konsumen sebagai satuan agregat. Demikian pula dengan perusahaan, permintaan, penawaran, harga, dan sebagainya.

Kalau titik berat penelaan ekonomi mikro adalah efisiensi, maka titik berat penelaan ekonomi makro adalah pendapatan nasional dan segala variabel yang mempengaruhi maupun dipengaruhi olehnya, seperti inflasi, konsumsi, uang, pengangguran, investasi, kebijaksanaan ekonomi pemerintah, dan sebagainya.

Secara rinci pembahasan dalam ilmu ekonomi makro adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan dalam model perekonomian dua sektor, tiga sektor, dan empat sektor serta angka penggandanya.
2. Pemerintah dan tingkat pendapatan.

3. Teori tentang permintaan konsumsi dari keynesian, sesudah perang dan sekarang.
4. Teori Investasi.
5. Keseimbangan di pasar barang.
6. Uang dan tingkat pendapatan.

1.2 Kaitan Antara Ekonomi Makro Dengan Ilmu Ekonomi

Sejauh ini alat pengukur yang sering digunakan untuk mengetahui secara kuantitatif arah, intensitas, dan kecepatan keberhasilan usaha yang dicapai adalah Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) atau yang sering disebut dengan Pendapatan nasional. Tetapi pendapatan Nasional sebenarnya lebih ditujukan untuk mengukur kemakmuran material masyarakat secara kuantitatif.

Untuk mengukur besarnya PNB ada cara pendekatan yang sering ditempuh. Cara pendekatan itu adalah pendekatan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga yang berpartisipasi dalam arus kegiatan ekonomi nasional dan cara pendekatan penerimaan yang diperoleh para pemilik faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.

1. Pendekatan Pengeluaran

Setiap rumah tangga, baik itu rumah tangga individu, rumah tangga perusahaan maupun rumah tangga pemerintah pasti melakukan pengeluaran untuk membeli semua kebutuhan yang diperlukan. Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga individu untuk membeli semua kebutuhannya yang diperlukan dapat berupa barang, baik barang habis pakai dan barang tahan lama, maupun jasa. Pengeluaran semua itu disebut konsumsi ($C = \textit{Consumption}$),

pengeluaran perusahaan biasanya berupa Investasi ($I = \text{Investasi}$),
pengeluaran pemerintah ($G = \text{Government Expenditure}$)

Disamping itu bagi negara yang juga melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain, masih terdapat pengeluaran bersih pembelian barang dan jasa oleh orang-orang dan badan-badan asing, pengeluaran tersebut disebut ekspor – impor ($X - M = \text{ekspor di kurangi impor, atau } \textit{net export}$). Secara singkat cara pendekatan pengeluaran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PNB} = C + I + G + (X - M)$$

PNB = Pendapatan Nasional Bruto

C = konsumsi (*consumption*)

I = Investasi (*Investment*)

G = Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*)

$X - M$ = Ekspor dikurangi impor (*net export*)

Pada cara pendekatan ini pengeluaran yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pengeluaran yang berbentuk pengeluaran untuk membeli barang modal atau investasi. Dalam ilmu ekonomi pengeluaran investasi hanya khusus pada pengeluaran rumah tangga perusahaan untuk membeli barang modal baru, sehingga investasi selalu berupa penambahan barang modal riil pada stok barang modal yang sudah ada. Termasuk pengeluaran investasi ini adalah:

- a.** Pembelian mesin-mesin, peralatan pabrik dan barang modal pabrik yang akan digunakan dalam proses produksi (jadi tidak untuk diperdagangkan).
- b.** Pembuatan rumah, pabrik dan semua jenis konstruksi baru pada tahun yang sama.

- c. Perubahan nilai barang cadangan sebagai akibat perubahan jumlah maupun harga pada tahun itu.

Pengeluaran untuk membeli surat-surat berharga, yang terkadang disebut sebagai investasi finansial, dalam ilmu ekonomi tidak dimasukkan kedalam pengeluaran investasi karena pengeluaran itu sebenarnya hanya merupakan perpindahan aktivasi saja dari pemilik yang satu ke pemilik yang lain. Demikian pula jika seseorang membeli mobil bekas untuk ditaksiran misalnya, maka pengeluaran itu tidak termasuk dalam pengeluaran investasi. Sekali lagi bahwa pengeluaran investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal baru oleh rumah tangga perusahaan.

Pengeluaran pemerintah digolongkan menjadi dua bagian:

- a. **Pengeluaran rutin** adalah pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, terdiri dari:
- Pengeluaran untuk belanja pegawai (tunjangan beras, gaji pensiun, uang makan, dll).
 - Pengeluaran untuk belanja barang.
 - Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom.
 - Pengeluaran untuk membayar harga dan cicilan hutang.
 - Pengeluaran lainnya.
- b. **Pengeluaran pembangunan**, terdiri dari:
- Pengeluaran untuk pembiayaan departemen/lembaga.
 - Pengeluaran untuk pembiayaan bagi daerah.
 - Pengeluaran untuk pembiayaan lain-lain.
 - Pengeluaran untuk bantuan proyek.

2. Pendekatan Penerimaan

Cara pendekatan penerimaan adalah komplemen cara pendekatan pengeluaran, karena sebenarnya cara pendekatan penerimaan bertitik tolak dari pengertian bahwa apa yang dikeluarkan oleh salah satu rumah tangga pasti menjadi penerimaan rumah tangga lain. Dalam perhitungan Pendapatan Nasional dengan pendekatan penerimaan ini ada dua hal yang dimasukkan didalamnya walaupun sebenarnya bukan merupakan penerimaan yaitu penyusutan dan pajak tak langsung.

Penyusutan perlu dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional karena penyusutan adalah bagian dari penerimaan perusahaan yang tidak dibagikan pemilik faktor produksi. Pajak tak langsung, yaitu pajak-pajak yang pada dasarnya beban pajaknya dapat digeserkan kepada pihak lain oleh para wajib pajak, seperti pajak penjualan, pajak tontonan, pajak pembangunan, pajak masuk dan sebagainya. Sebenarnya pajak tak langsung hanyalah pemindahan daya beli dari kantong konsumen (pembayar pajak) kepada pemerintah yang terjadi pada saat transaksi dilakukan, karena sifat pajak tak langsung adalah demikian, maka pajak tak langsung tidak diterima oleh pemilik faktor produksi, sehingga harus diperhitungkan sendiri.

Untuk lebih jelasnya berikut ini uraian mengenai beberapa penerimaan negara:

a. Penerimaan Dalam Negeri

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang ditinjau dari segi administratif adalah pajak yang langsung dikenakan kepada masing-masing wajib pajak dan tidak bisa digantikan oleh pihak lain, terdiri dari :

- Pajak Pendapatan

- Pajak Perseroan
- Pajak Perseroan Minyak
- MPO
- IPEDA (Iuran Pungutan Daerah)

2) **Pajak Tidak Langsung**, yaitu pajak yang dapat digantikan oleh pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, terdiri dari:

- Pajak Penjualan
- Pajak Penjualan Impor
- Cukai
- Bea Masuk
- Pajak Ekspor

3) **Penerimaan bukan pajak**, yaitu penerimaan dari penjualan barang-barang milik pemerintah dari penerimaan jasa, dari penerimaan kejaksaan dan peradilan, penerimaan pendidikan, iuran hasil hutan dan lain-lain.

b. Penerimaan Pembangunan

Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari bantuan luar negeri yang dinyatakan dalam rupiah dan terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek. Bantuan program adalah bantuan luar negeri untuk mendukung program-program tertentu, misalnya program pendidikan, kesehatan. Sedangkan bantuan proyek adalah bantuan dari luar negeri dalam rangka untuk membangun proyek-proyek sosial di dalam masyarakat seperti, bantuan air bersih, jembatan, jalan dan lain-lain.

1.3 Variabel yang Dipelajari Dalam Ekonomi Makro

1. Kebijakan Moneter

a. Konsep Dasar Teori Moneter

Teori moneter bukannya merupakan sesuatu yang dapat dipisahkan dari Teori Ekonomi. Ini mempunyai hubungan yang erat dengan semua area/jurusan/bagian dari ilmu ekonomi, termasuk teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen dan teori keseimbangan umum. Teori moneter ini menggunakan dasar asumsi yang digunakan dalam Teori Ekonomi Ortodoks, menanyakan hal yang sama menggunakan konsep dan metode analisis yang sama. Adanya perkembangan dalam cabang teori ekonomi yang lain mempunyai dampak pada ekonomi moneter dan sebaliknya. Teori moneter mempunyai kekhususan yang dimilikinya dalam artian bahwa dalam sejarah perkembangan, ekonomi moneter mengkhususkan pada pertanyaan tertentu dan beberapa konsep yang telah mempunyai pengaruh besar pada teori moneter dibandingkan cabang ekonomi yang lain.

b. Makna Teori Moneter

Menurut buku-buku literatur yang dimaksud dengan Teori Moneter adalah: Teori yang membahas mengenai pasar uang atau dengan kata lain teori mengenai permintaan dan penawaran akan uang. Sedangkan secara luas arti teori moneter adalah analisa mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan akan uang (*demand for money*) dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penawaran akan uang (*supply of money*). Permintaan dan penawaran di dalam pasar akan menentukan harga.

Ada dua macam konsep “harga uang” yang selalu menjadi pusat perhatian dari teori-teori moneter sejak dua abad yang lalu sampai sekarang, yaitu **tingkat bunga** dan **tingkat harga umum**. Teori-teori moneter tertentu (yang sealiran dengan teori moneter dari Keynes) lebih menekankan pada tingkat bunga sebagai harga yang ditentukan di pasar uang. Sedangkan teori moneter yang berdasar pada teori Kuantitas mengatakan bahwa pasar uang menentukan tingkat harga umum, bukan tingkat bunga.

Mengapa perubahan kondisi pasar uang, yang dicerminkan oleh perubahan tingkat bunga atau tingkat harga penting? Dalam masyarakat modern, uang dipergunakan secara luas oleh para anggota masyarakat untuk:

- 1) *Means of exchange* (alat tukar-menukar)
- 2) *Measure of Value* (pengukur nilai)
- 3) *Standard for Deferred Payments* (standar ukuran pembayaran masa depan)
- 4) *Store of Value / Store of Wealth* (satu cara untuk menyimpan daya beli/kekayaan)

c. Standar Moneter

Standar moneter diartikan sebagai sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang, termasuk di dalamnya peraturan tentang ciri-ciri/sifat-sifat dari uang, pengaturan tentang jumlah uang yang beredar (baik logam maupun kertas), ekspor-impor logam-logam mulia serta fasilitas bank dalam hubungannya dengan ekspansi *demand deposit*.

Macam-macam standar moneter:

1) Standar Barang (*Commodity Standard*)

Diartikan sebagai sistem moneter di mana nilai/tenaga beli uang dijamin sama dengan seberat tertentu barang (emas, perak dan seterusnya). Setiap nilai uang yang beredar dijamin dengan seberat tertentu barang yang ditentukan oleh pemerintah. Standar barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) Standar Emas (*The Gold Standard*)

Standar emas didefinisikan sebagai suatu sistem moneter dimana sesuatu bangsa mengucapkan (menyatakan) kesatuan moneternya dengan emas, bebas menjual-belikan emas dengan harga yang pasti dan mengizinkan orang-orang untuk mengimpor dan mengekspor emas tanpa batas.

b) Standar Perak (*The Silver Standard*)

Standar moneternya dinyatakan dengan perak.

c) Standar Kembar (*The Gold and Silver Standard*)

Standar sistem perekonomian suatu negara menggunakan emas dan perak.

2) Standar kepercayaan (*Fait Standard*)

Diartikan sebagai sistem moneter dimana nilai/tenaga beli uang tidak dijamin dengan seberat tertentu barang (logam). Hanya atas dasar kepercayaan masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah serta alat penukar dan sebagainya.

2. Kebijakan Moneter Di Negara Sedang Berkembang

Kebijakan moneter biasanya dikaitkan dengan pengawasan jumlah uang yang beredar (JUB) dan kredit, stabilisasi harga dan pertumbuhan ekonomi. Banyak yang mempertimbangkan stabilitas harga sebagai tujuan yang paling utama di negara –negara yang sedang berkembang disebabkan karena di negara sedang berkembang banyak yang mengalami inflasi berat (jika dibandingkan dengan negara-negara maju). Kebijakan moneter di negara sedang berkembang dirasakan lebih efektif daripada kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi seperti di Indonesia.

Sebenarnya tingkat pertumbuhan JUB di negara sedang berkembang harus dapat mengimbangi pertumbuhan ekonominya, untuk menghindari inflasi. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa kebijakan moneter memperlancar jalannya pertumbuhan ekonomi dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kontribusi kebijakan moneter dalam memperlancar pencapaian tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi secara tidak langsung dapat dikatakan ikut membentuk pencapaian *full employment*.

Kebijakan moneter itu bagaikan “dawai gitar” karena dapat ditarik untuk meredam inflasi tetapi tidak dapat ditekan (dorong) untuk mengatasi resesi. Oleh karena itu, oleh Keynes ditawarkan secara simultan penjelasan tentang arti penting kebijakan moneter di mana diharapkan mampu meredam depresi. Kebijakan moneter adalah bagian dari kebijakan ekonomi makro. Oleh sebab itu kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran.

Tentunya semua sasaran tersebut perlu dicapai serentak dan maksimal. Atau dengan kata lain melalui kebijaksanaan moneter diharapkan dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah serta perkembangan keseimbangan neraca pembayaran yang mantap.

Manfaat Kebijakan moneter bagi negara yang sedang berkembang adalah:

- a. Memperlancar jalannya pertumbuhan ekonomi
- b. Membantu pencapaian *full employment*
- c. Meningkatkan JUB sehingga dapat menekan pengangguran (dalam jangka pendek)
- d. Mencapai tingkat keseimbangan (*equilibrium*) dalam Neraca Pembayaran Internasional (NPI)
- e. Menjaga stabilitas nilai tukar di sebuah negara
- f. Tercapainya stabilitas harga
- g. Tercapaiannya pemeratan pembangunan

3. Kebijakan Fiskal

a. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah (negara) untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya roda perekonomian agar dapat dikembangkan iklim usaha yang baik, serta mengatur agar distribusi pendapatan dapat menjadi lebih baik, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Disamping itu melalui kebijakan fiskal, pemerintah juga dapat melakukan campur tangan melalui pembuatan-pembuatan peraturan,

pembuatan usaha negara dan kebijakan yang lainnya. Dengan kata lain kebijakan fiskal erat berhubungan dengan APBN.

Kebijakan fiskal juga berpengaruh langsung terhadap tingkat permintaan. Peningkatan pengeluaran (anggaran belanja) pemerintah akan bersifat ekspansioner dengan meningkatnya permintaan. Pertama-tama pada sektor pemerintah dan kemudian menjalar ke sektor swasta. Sejalan dengan itu, pengurangan-pengurangan pajak bisa juga bersifat ekspansioner karena para wajib pajak akan mempunyai pendapatan disposibel yang lebih besar sehingga diharapkan akan membelanjakan jumlah pendapatan yang lebih besar.

b. Macam-macam Kebijakan Fiskal

1) Kebijakan Fiskal Yang Sengaja (*discretionary*)

Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi gelombang konjungtur dengan memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui pengubahan perpajakan atau pengubahan pengeluaran pemerintah. Dengan usaha ini terlihat seberapa jauh peranan pemerintah dalam melakukan campur tangannya dalam pengaturan jalanya roda perekonomian.

2) Kebijakan Fiskal Pasif (*automatic stabilizers* atau *built-in stabilizer*)

Kebijakan pasif adalah kebijakan yang erat kaitannya dengan penerapan berbagai pajak. Dalam realitanya sebagian besar dari pajak-pajak yang dikenakan pada masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, berhubungan erat dengan tingginya arus

pendapatan nasional. Semakin tinggi arus pendapatan nasional, semakin pula penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak, baik langsung maupun tak langsung. Pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak kekayaan dan sebagainya adalah pajak langsung yang jelas sekali berhubungan dengan tingkat pendapatan negara.

Pajak penjualan, bea masuk, cukai tembakau dan sebagainya adalah pajak tak langsung yang besar penerimaannya daripadanya tergantung pada banyaknya dan tingginya transaksi atau produksi. Tetapi banyaknya dan tingginya transaksi serta tingginya produksi barang-barang tentu tergantung dari daya beli masyarakat, jadi pada pendapatan nasional. Dengan demikian jelasnya bahwa penerimaan negara dari pajak berbanding langsung dengan tingginya arus pendapatan secara sederhana hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: $T = T_0 + t y$

Pajak-pajak yang dapat berfungsi sebagai rem yang memberikan reaksi secara otomatis terhadap perubahan pendapatan nasional disebut sebagai **Kebijakan Fiskal Pasif** (*built-in stabilizers*).

BAB II

KONSEP DASAR PENDAPATAN NASIONAL

2.1 Pengertian Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

2.2 Konsep Pendapatan Nasional

1. PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/*Gross Domestic Product*)

Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan.

2. PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/*Gross Nasional Product*)

PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri.

Rumus:

$$\mathbf{GNP = GDP - \text{Produk netto terhadap luar negeri}}$$

3. NNP (*Net National Product*)

NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.

Rumus :

$$\mathbf{NNP = GNP - \text{Penyusutan}}$$

4. NNI (*Net National Income*)

NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (*indirect tax*).

Rumus :

$$\mathbf{NNI = NNP - \text{Pajak tidak langsung}}$$

5. PI (*Personal Income*)

PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan dan ditambah dengan *transfer payment*.

Rumus :

$$\mathbf{PI = (NNI + \text{transfer payment}) - (\text{Laba ditahan} + \text{Iuran asuransi} + \text{Iuran jaminan sosial} + \text{Pajak perseorangan})}$$

6. DI (*Disposable Income*)

DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya.

Rumus :

$$\mathbf{DI = PI - Pajak\ langsung}$$

2.3 Kegunaan Statistik Pendapatan Nasional

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PNB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara.
3. PDB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
4. Distribusi PDB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
5. PDB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.

6. Distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
7. PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.
8. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk.
9. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

2.4 Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

1. Tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Tujuan mempelajari pendapatan nasional:
 - a. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara.
 - b. Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun.
 - c. Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka.
2. Manfaat mempelajari pendapatan nasional
 - a. Mengetahui tentang struktur perekonomian suatu negara.
 - b. Dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar provinsi.
 - c. Dapat membandingkan keadaan perekonomian antar negara.
 - d. Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah.

3. Perhitungan Pendapatan Nasional

a. Metode Produksi

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu.

$$Y = [(Q1 \times P1) + (Q2 \times P2) + (Qn \times Pn) \dots\dots]$$

Keterangan:

Y = Produk Nasional atau Produk Domestik Bruto (PNB atau GDP)

P = Harga Barang dari unit ke-I hingga unit ke-n

Q = Jumlah barang dari jenis ke-I hingga jenis ke-n

PNB atau GDP diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian. Hal ini dilakukan untuk menghindari penilaian yang terlalu tinggi atas *output* yang diproduksi dengan perhitungan ganda (*double accounting*), baik barang jadi dan jasa jadi maupun barang setengah jadi dan jasa yang masih harus diolah. Untuk itu hanya nilai tambah pada setiap tahap proses produksi tersebut yang dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Dalam hal ini, GDP atau PNB merupakan penjumlahan dari nilai tambah sektor pertanian ditambah nilai tambah di sektor manufaktur dan seterusnya.

Pendapatan nasional menurut metode produksi dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh hasil produksi masyarakat dari seluruh lapangan usaha di dalam satu tahun diukur dengan nilai uang.

Komponen-komponen pembentuk pendapatan nasional menurut metode produksi terdiri atas sebelas sektor, yaitu:

1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri dan pengolahan
4. Listrik, gas, dan air minum
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel, restoran
7. Pengangkutan dan telekomunikasi
8. Bank dan lembaga keuangan lainnya
9. Pemerintahan dan pertahanan
10. Jasa-jasa lainnya

b. Metode Pendapatan

Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (*rent, wage, interest, profit*) yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode.

$$Y = r + w + i + p$$

Dengan demikian, komponen-komponen pembentuk pendapatan nasional menurut metode pendapatan/penerimaan terdiri atas empat komponen, yaitu:

1. Sewa (*rent*) yang diterima pemilik faktor produksi alam.
2. Upah (*wages*) atau Gaji (*Salary*) yang diterima pemilik faktor produksi tenaga kerja.
3. Bunga modal (*interest*) yang diterima pemilik faktor produksi modal.

4. Laba (*profit*) yang diterima pemilik faktor produksi kewirausahaan (*entrepreneurship*)

c. Metode Pengeluaran

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK, RTP, RTG, RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun.

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

C = Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga Konsumen (RTK)

I = Pengeluaran Investasi Rumah Tangga Produsen (RTP)

G = Pengeluaran pemerintah dari Rumah Tangga Pemerintah (RTG)

X = Ekspor

M = Impor

PRODUKSI (1)	PENDAPATAN (2)	PENGELUARAN (3)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	UPAH	KONSUMSI
Pertambangan dan Penggalian	SEWA	INVESTASI
Industri Pengolahan	BUNGA	PENGELUARAN PEMERINTAH
Listrik, Gas dan Air Bersih	LABA	EKPOR NETTO
Konstruksi	$Y = W + r + I + P$	$Y = C + I + G + (X-M)$
Perdagangan, Hotel dan Restoran		
Pengangkutan dan Komunikasi		
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan		
Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.		

PENDAPATAN DAN PRODUK NASIONAL

Upah dan gaji (w & s)	Rp...	Pengeluaran konsumsi (c)	Rp...
Sewa (rent/r)	Rp...	Pengeluaran investasi (i)	Rp...
Bunga (i)	Rp...	Pengeluaran pemerintah (g)	Rp...
Laba (p)	Rp...	Ekspor netto (X-M)	Rp...
Pendapatan nasional atas dasar biaya produksi			
	Rp...		
+ transfer perusahaan	Rp...		
+ pajak tidak langsung	Rp...		
- subsidi	Rp...		
+ penyusutan	Rp...		
Pendapatan nasional atas dasar harga pasar		Pendapatan nasional atas dasar harga pasar	
	Rp...		Rp...

2.5 Masalah Dan Keterbatasan Perhitungan PDB

1. Perhitungan PDB dan Analisa Kemakmuran

Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk (disebut PDB per kapita). Menurut PBB, sebuah negara dikatakan miskin bila PDB per kapitanya lebih kecil daripada US\$ 450,00. Berdasarkan standar ini, maka sebagian besar negara-

negara di dunia adalah negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur/kaya bila PDB perkapita lebih besar daripada US\$ 800.

Kelemahan dari pendekatan di atas adalah tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibatnya angka PDB per kapita kurang memberikan gambaran rinci tentang kondisi kemakmuran suatu negara. Misalnya, walaupun Amerika Serikat yang PDB perkapitanya US\$ 29.080 (tahun 1997), namun negara itu masih terus bergelut dengan masalah kemiskinan dan pengangguran, terutama di kalangan warga kulit hitam ataupun pendatang (kulit berwarna). Bahkan secara absolut tampaknya jumlah penduduk miskin di Amerika Serikat akan bertambah.

Faktor utama pemicu gejala di atas adalah masalah distribusi pendapatan. Walaupun distribusi pendapatan di USA relatif baik, tetapi belum sempurna untuk membuat seluruh penduduknya menjadi makmur. Bahkan untuk faktor produksi non tenaga kerja, terutama uang dan modal, distribusi penguasaannya sangat buruk. Pada tahun 1996, sekitar 46% aset finansial dikuasai hanya oleh sekitar 1% penduduk.

2. Perhitungan PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial

Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik. Ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial makin membaik. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan logika sederhana. Jika PDB per kapita makin tinggi, maka daya beli

masyarakat, kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin membaik. Sehingga gizi, kesehatan, pendidikan, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan, kondisinya makin meningkat. Tapi dengan catatan, peningkatan PDB per kapita disertai perbaikan distribusi pendapatan.

Masalah mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak diperhatikannya dimensi nonmaterial. Sebab PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik/materi yang dapat diukur dengan nilai uang. Sedangkan output yang tidak terukur dengan uang, misalnya ketenangan batin yang diperoleh dengan menyandarkan hidup pada norma-norma agama/spiritual tidak dihitung. Sebab, dalam kenyataannya kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemakmuran, tetapi juga ketenangan batin.

Jadi kita tidak bisa serta merta mengatakan bahwa kesejahteraan sosial di negara-negara kaya (Amerika Serikat dan Jepang) adalah jauh lebih baik dibanding di negara-negara miskin (misal Bhutan dan Nepal). Karena, tingkat kejahatan dan tingkat bunuh diri di negara-negara kaya tersebut lebih tinggi di banding negara-negara miskin.

3. PDB per Kapita dan Masalah Produktivitas

Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antar negara, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

a. Jumlah dan komposisi penduduk:

Bila jumlah penduduk makin besar, komposisi-nya sebagian besar adalah penduduk usia kerja (15 - 64 tahun) dan berpendidikan tinggi (> SLTA), maka tingkat output dan produktivitasnya dapat makin baik.

b. Jumlah dan struktur kesempatan kerja:

Jumlah kesempatan kerja yang makin besar memperbanyak penduduk usia kerja yang dapat terlibat dalam proses produksi. Tetapi komposisi kerja pun mempengaruhi tingkat produktivitas. Sekalipun kesempatan kerja sangat besar, tetapi semuanya adalah kesempatan kerja sektor pertanian, produktivitas pekerja juga tidak tinggi. Sebab sektor pertanian umumnya memiliki nilai tambah yang rendah. Jika kesempatan kerja yang dominan berasal dari sektor kegiatan ekonomi modern (industri dan jasa), maka output per pekerja akan relatif tinggi, karena nilai tambah kedua sektor tersebut amat tinggi.

c. Faktor-faktor nonekonomi :

Yang tercakup dalam faktor-faktor nonekonomi antara lain etika kerja, tata nilai, faktor kebudayaan dan sejarah perkembangan. Jepang pantas menjadi negara yang produktif sebab selain jumlah penduduk yang banyak, berpendidikan tinggi dan umumnya bekerja di sektor modern, mereka juga memiliki etika kerja yang baik, menjunjung tinggi kejujuran dan penghargaan terhadap senior. Dan Jepang juga merupakan negara yang selama kurang lebih 3.000 tahun terus menerus membangun dirinya menjadi bangsa modern, walaupun pembangunan ekonomi modernnya baru dimulai dua abad yang lalu.

4. Penghitungan PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak Tercatat (*underground economic*)

Angka statistik PDB Indonesia yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik hanya mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Karena itu,

statistik PDB belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Misalnya, upah pembantu rumah tangga di Indonesia tidak tercatat. Begitu juga dengan kegiatan petani buah yang langsung menjual produknya ke pasar.

Di negara-negara berkembang, keterbatasan kemampuan pencatatan lebih disebabkan oleh kelemahan administratif dan struktur kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan informal. Tetapi di negara-negara maju, kebanyakan kegiatan ekonomi yang tak tercatat disebabkan oleh karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal atau melawan hukum. Padahal, nilai transaksinya sangat besar. Misalnya, kegiatan penjualan obat bius dan obat-obat terlarang lainnya.

BAB III

EKONOMI DUA SEKTOR

3.1 Perekonomian Dua Sektor

Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor.

Dalam perekonomian dua sektor sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu pemerintah tidak memungut pajak maka pendapatan nasional (Y) adalah sama dengan pendapatan disepel (Y_d) atau $Y = Y_d$.

Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan yaitu untuk pengeluaran konsumsi dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk modal, untuk membeli barang-barang seperti mesin-mesin, bahan baku, peralatan produksi, mendirikan bangunan pabrik dan bangunan kantor.



Gambar 3.1 Alur Perekonomian Dua Sektor

3.2 Hubungan Antara Konsumsi dan Pendapatan

Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga (secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi). Yang terpenting dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan diantara konsumsi rumah tangga dan pendapatan dinamakan daftar konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatannya yang berubah-ubah.

Misalnya, seperti dapat dilihat dalam tabel 1.1, pada waktu pendapatan seseorang adalah Rp. 500 ribu konsumsinya adalah Rp. 500 ribu, pada waktu pendapatannya Rp. 900 ribu konsumsinya Rp. 800 ribu, tabel 1.1 secara terperinci menunjukkan hubungan di antara tingkat pendapatan disepel dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga.

Tabel 3.1 Daftar konsumsi dan tabungan rumah tangga (dalam ribuan rupiah)

Pendapatan disepel (Y_d)	Pengeluaran konsumsi (C)	Tabungan (S)
0	125	-125
100	200	-100
200	275	-75
300	350	-50
400	425	-25
500	500	0
600	575	25
700	650	50
800	725	75

Pendapatan disposibel (Y_d)	Pengeluaran konsumsi (C)	Tabungan (S)
900	800	100
1000	875	125

Ciri khas dari hubungan di antara pendapatan *disposable*, pengeluaran konsumsi dan tabungan, yaitu:

1. Pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengorek tabungan. Pada waktu pendapatan disposibel adalah ($Y_d = 0$), pengeluaran konsumsi adalah Rp. 125 ribu. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya.
2. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi dari pada pertambahan konsumsi. Contoh dalam tabel 3.1 menunjukkan apabila pendapatan bertambah sebanyak Rp. 100 ribu, konsumsi bertambah sebanyak Rp. 75 ribu. Sisa pertambahan pendapatan itu (Rp. 25 ribu) ditabung.
3. Pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Pertambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertumbuhan konsumsi maka pada akhirnya rumah tangga tidak “mengorek tabungan” lagi. ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Tabel 3.1 menunjukkan apabila pendapatan rumah tangga lebih dari Rp. 500 ribu, konsumsinya lebih rendah dari pendapatannya. Sebagai contoh, pada pendapatan Rp. 900 ribu, konsumsinya adalah Rp. 800 ribu dan ini menunjukkan rumah tangga sudah menabung sebanyak Rp. 100 ribu.

3.3 Kecondongan Mengkonsumsi Marjinal

Untuk memahami dengan baik sifat hubungan di antara pendapatan disposibel dengan konsumsi, dan pendapatan disposibel dengan tabungan perlulah diterangkan dua konsep penting berikut:

1. MPC (*Marginal Propensity to Consume*)

Perbandingan di antara pertambahan konsumsi (ΔC) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposebel (ΔY_d) yang diperoleh.

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y_d}$$

$$\Delta Y_d$$

2. APC (*Average Propensity to Consume*)

Perbandingan diantara tingkat konsumsi (C) dengan tingkat pendapatan disposebel ketika konsumsi tersebut dilakukan (Y_d).

$$APC = \frac{C}{Y_d}$$

$$Y_d$$

Contoh Menghitung MPC dan APC

Pendapatan disposibel (Y_d) (1)	Pengeluaran konsumsi (C) (2)	Kecondongan Mengkonsumsi Marjinal (MPC) (3)	Kecondongan Mengkonsumsi Rata-rata (APC) (4)
Contoh 1 : MPC Tetap			
Rp 200 ribu	Rp 300 ribu	$150 / 200 = 0,75$	$300 / 200 = 1,50$
Rp 400 ribu	Rp 450 ribu	$150 / 200 = 0,75$	$450 / 400 = 1,125$
Rp 600 ribu	Rp 600 ribu	$150 / 200 = 0,75$	$600 / 600 = 1,00$
Rp 800 ribu	Rp 750 ribu		$750 / 800 = 0,937$

Contoh 2 : MPC Makin Kecil			
Rp 200 ribu	Rp 300 ribu	$160 / 200 = 0.80$	$300 / 200 = 1,50$
Rp 400 ribu	Rp 460 ribu	$150 / 200 = 0,75$	$460 / 400 = 1,15$
Rp 600 ribu	Rp 610 ribu	$140 / 200 = 0.70$	$610 / 600 = 1,017$
Rp 800 ribu	Rp 750 ribu		$750 / 800 = 0,937$

Dalam contoh 1 digambarkan pendapatan disposibel dalam kolom (1) selalu bertambah sebanyak Rp. 200 ribu dan ini mengakibatkan konsumsi, yang ditunjukkan dalam kolom (2) , juga senantiasa bertambah sebanyak Rp. 150 ribu. Maka MPC, yang ditunjukkan kolom (3) adalah 0,75 dan dibuktikan dengan penghitungan berikut :

$$MPC = \Delta C = 150 \text{ ribu} = 0,75$$

$$\Delta Yd \text{ 200 ribu}$$

Dalam contoh 2 digambarkan pendapatan disposebel juga selalu bertambah sebanyak Rp. 200 ribu, tetapi kenaikan konsumsi rumah tangga makin kecil pertambahannya. Sifat hubungan diantara pertambahan pendapatan disposebel dan konsumsi adalah :

1. Apabila pendapatan disposebel bertambah dari Rp. 200 ribu menjadi Rp. 400 ribu, konsumsi naik dari Rp. 300 ribu menjadi Rp .460 ribu. Pada perubahan pendapatan dan konsumsi ini MPC adalah:

$$(460 - 300) / (400 - 200) = 0,8$$

2. Apabila pendapatan disposebel bertambah dari Rp. 400 ribu menjadi Rp. 600 ribu, konsumsi bertambah dari Rp. 460 ribu menjadi Rp. 610 ribu. Maka MPC:

$$(610 - 460) / (600 - 400) = 0,75$$

Apabila pendapatan disposebel bertambah dari Rp. 600 ribu menjadi Rp. 800 ribu, konsumsi bertambah dari Rp. 610 ribu menjadi Rp. 750 ribu. Maka MPC:

$$(750 - 610) / (800 - 600) = 0,70$$

Untuk perhitungan APC dapat dilihat pada kolom (4). Dari contoh 1 dan 2 dapat dilihat bahwa APC berubah-ubah nilainya, dan nilainya makin lama makin rendah. Apabila Y_d lebih kecil dari C, maka APC lebih besar dari 1 (sebagai contoh pada $Y_d = \text{Rp. } 200$ ribu, $C = \text{Rp. } 300$ ribu, maka $APC = 300 / 200 = 1,5$); dan apabila Y_d lebih besar dari C, maka APC lebih kecil dari 1 (sebagai contoh pada $Y_d = \text{Rp. } 800$ ribu, $C = \text{Rp. } 750$ ribu, maka $APC = 750 / 800 = 0,9375$).

3.4 Kecondongan Menabung Marjinal

1. MPS (*Marginal Propensity to Save*) atau Kecondongan menabung marginal

Adalah perbandingan diantara perubahan tabungan (S) dengan pertambahan pendapatan disposebel (Y_d).

Nilai MPS dihitung dengan menggunakan rumus:

$$MPS = \frac{S}{Y_d}$$

$$(Y_d)$$

2. APS (*Average Propensity to Save*) atau Kecondongan menabung rata-rata

Adalah perbandingan di antara tabungan (S) dengan pendapatan diposebel (Y_d). Nilai APS dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$APS = \frac{S}{Y_d}$$

Contoh 1: MPS tetap

Pendapatan Disposibel (Yd)	Pengeluaran Konsumsi (C)	Tabungan (S)	MPS	APS
Rp 200 ribu	Rp 300 ribu	Rp -100 ribu	-	$-100/200 = -0,50$
Rp 400 ribu	Rp 450 ribu	Rp - 50 ribu	$50/200 = 0,25$	$-50/400 = -0,25$
Rp 600 ribu	Rp 600 ribu	Rp 0 ribu	$50/200 = 0,25$	$0/600 = 0$
Rp 800 ribu	Rp 750 ribu	Rp 50 ribu	$50/200 = 0,25$	$50/800 = 0,0625$

Contoh 2: MPS makin besar

Pendapatan Disposibel (Yd)	Pengeluaran Konsumsi (C)	Tabungan (S)	MPS	APS
Rp 200 ribu	Rp 300 ribu	Rp -100 ribu	-	$-100/200 = -0,50$
Rp 400 ribu	Rp 450 ribu	Rp - 60 ribu	$40/200 = 0,20$	$-60/400 = -0,15$
Rp 600 ribu	Rp 600 ribu	Rp -10 ribu	$50/200 = 0,25$	$-10/600 = -0,017$
Rp 800 ribu	Rp 750 ribu	Rp 50 ribu	$60/200 = 0,30$	$50/800 = 0,0625$

Berdasarkan pada data tersebut MPS adalah seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan di bawah ini.

1. Apabila pendapatan disposibel bertambah dari Rp. 200 ribu menjadi Rp. 400 ribu, tabungan berubah dari Rp. -100 ribu menjadi Rp. -60, maka $MPS = \{(-60) - (-100) / (400-200)\} = 0,20$
2. Apabila pendapatan disepesibel bertambah dari Rp. 400 ribu menjadi Rp. 600 ribu, tabungan berubah dari Rp. -60 ribu menjadi Rp. -10, maka $MPS = \{(-10) - (-60)/(600-400)\} = 0,25$

3. Apabila pendapatan disposebel bertambah dari Rp. 800 ribu menjadi Rp. 600 ribu, tabungan berubah dari Rp. -10 ribu menjadi Rp. 50, maka MPS =

$$\{(50) - (-10) / 800 - 600\} = 0,30$$

Dari tabel contoh 1 dan 2 ini dapat kita lihat bahwa nilai APS semakin besar apabila pendapatan disposebel bertambah. Pada mulanya nilainya negatif, karena rumah tangga masih melakukan “mengorek tabungan atau *“dissaving”* .

Dibawah ini ditunjukkan 2 contoh perhitungan APS.

1. Dalam contoh 1, apabila pendapatan disposebel adalah Rp. 200 ribu, tabungan adalah Rp. -100, maka APS adalah $S/Y = -100/200 = -0,5$
2. Dalam Contoh 2, apabila pendapatan disposebel adalah Rp. 400 ribu, tabungan adalah Rp. -60, maka APS adalah $S/Y = -60/400 = -0,15$

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan disposibel sangat mempengaruhi jumlah konsumsi dan tabungan sehingga MPS dan APS juga akan mengalami perubahan.

Hubungan diantara Kecondongan mengkonsumsi dan menabung bukti $MPS + MPC = 1$ dan $APC + APS = 1$

Pembuktian dengan aljabar dapat kita lihat dari bahwa pendapatan disposebel sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah dengan tabungan rumah tangga. Dalam persamaan:

$$Y_d = C + S$$

Apabila persamaan tersebut kita bagi dengan Y_d , maka:

$$Y_d = C + S$$

$$Y_d \quad Y_d \quad Y_d$$

$$1 = APC + APS \dots\dots \text{terbukti}$$

$$\text{Karena } C/Y_d = APC$$

$$S/Y_d = APS$$

Hal ini juga terjadi apabila rumah tangga mengalami kenaikan pendapatan maka konsumsi dan tabungan akan bertambah. Hubungan diantara pertambahan pendapatan, pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\Delta Y_d = \Delta C + \Delta S$$

Apabila masing-masing komponen dari persamaan di atas di bagi oleh ΔY_d , maka akan diperoleh:

$$\Delta Y_d = \Delta C + \Delta S$$

$$\Delta Y_d \quad \Delta Y_d \quad \Delta Y_d$$

$$1 = MPC + MPS \dots\dots \text{terbukti}$$

$$\text{Karena } \Delta C / \Delta Y_d = MPC$$

3.5 Fungsi Konsumsi Dan Tabungan

Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (pendapatan disposable) perekonomian tersebut.

Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (pendapatan disposable) perekonomian tersebut.

Pendapatan Nasional Dalam Keseimbangan

$$Y = C + S$$

Pendapatan Nasional	Konsumsi	Tabungan
0	90	-90
120	180	-60
240	270	-30
360	360	0
480	450	30
600	540	60
720	630	90
840	720	120
960	810	150
1080	900	180
1200	990	210

Persamaan Matematis

Fungsi konsumsi ialah $C = a + bY$

Fungsi tabungan ialah $S = -a + (1 - b)Y$

- Konsumsi, pendapatan dan tabungan hubungannya sangat erat. Menurut pendapat JM Keynes dikenal dengan *Psychological Consumption* membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.
- Pendapat JM Keynes sebagai berikut:
 - Jika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan.
 - Setiap kenaikan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan.

- Setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan tabungan.

1. Ciri-ciri Fungsi Konsumsi dan Tabungan

Sebelum menerangkan ciri-ciri fungsi konsumsi dan fungsi tabungan terlebih dahulu perlu didefinisikan arti dari istilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan.

- a. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan diantara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut.
- b. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan diantara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut.

2. Penentu-penentu Lain Konsumsi dan Tabungan

- a. Kekayaan yang telah terkumpul.
- b. Suku bunga.
- c. Sikap berhemat.
- d. Keadaan perekonomian.
- e. Distribusi pendapatan.
- f. Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi.

3.6 Investasi (Penanaman Modal)

1. Definisi dan arti Investasi

Investasi atau penanaman modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan

penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

2. Fungsi investasi

Kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat Pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Investasi mempunyai dampak sangat besar terhadap bertambahnya pendapatan nasional. Bila dirumuskan:

$$Y = C + S$$

$$Y = C + I$$

$$\text{Sehingga } I = S$$

Keterangan:

Y (*yield*) : Pendapatan

C (Consumption) : Konsumsi

S (Saving) : Tabungan

3. Penentu-penentu tingkat Investasi

- a. Ramalan keadaan perekonomian di masa depan.
- b. Perubahan dan perkembangan teknologi.
- c. Efek pertumbuhan pendapatan nasional.
- d. Keuntungan perusahaan.

3.7 Penentuan Tingkat Kegiatan Ekonomi

Analisa makro ekonomi biasanya tidak memberikan gambaran yang sangat rumit mengenai aliran-aliran pendapatan yang sebenarnya berlaku di dalam kenyataan. Gambaran semacam itu tidak diperlukan dalam analisa ekonomi, karena dengan menyederhanakan gambaran itu telah dapat ditunjukkan corak kegiatan yang terjadi dalam suatu perekonomian. Gambaran yang paling sederhana dari kegiatan dalam sesuatu perekonomian ditunjukkan oleh aliran-aliran pendapatan

diantara dua faktor ekonomi yang pertama, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.

Oleh karena dalam perekonomian tidak terdapat kekurangan permintaan, menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik dimana tingkat kegiatan ekonomi akan di capai tergantung kepada kemampuan sector perusahaan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Kesanggupan ini dibatasi oleh banyaknya faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian itu. Oleh sebab itu menurut ahli-ahli ekonomi klasik sampai dimana sesuatu perekonomian dapat memproduksi barang-barang dan jasa-jasa dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$Y = f (K,L,Q,T)$$

Keterangan:

Y : Pendapatan nasional

K : Jumlah seluruh barang modal

L : Jumlahseluruh tenaga kerja

Q : Jumlah kekayaan alam yang di gunakan

T : Tingkat teknologi yang digunakan

3.8 Keseimbangan Perekonomian Negara

Keseimbangan Perekonomian Negara adalah suatu keadaan dimana perekonomian menjadi seimbang jika pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agrerat dan investasi sama dengan tabungan.

$$Y = C + I$$

$$I = S$$

Untuk menentukan tingkat kesimbangan perekonomian Negara dapat digunakan 3 cara yaitu:

1. Menggunakan contoh angka pendapatan nasional dan perbelanjaan agregat.
2. Menggunakan grafik yang menunjukkan :
 - a. Kesamaan perbelanjaan agregat dengan penawaran agregat.
 - b. Kesamaan diantara investasi dan tabungan
3. Menggunakan cara pembuktian secara aljabar.

Contoh: angka keseimbangan pendapatan nasional.

Pendapatan Nasional (Y) (1)	Konsumsi (C) (2)	Tabungan (S) (3)	Investasi (I) (4)	Pengeluaran Agregat (AE) (5)	Keadaan perekonomian (6)
0	90	-90	120	210	EKSPANSI
120	180	-60	120	300	
240	270	-30	120	390	
360	360	0	120	480	
480	450	30	120	570	
600	540	60	120	660	
720	630	90	120	750	
840	720	120	120	840	SEIMBANG
960	810	150	120	930	KONTRAKSI
1080	900	180	120	1020	
1200	990	210	120	1110	

Ekspansi yaitu dalam tabel dapat dilihat pada waktu pendapatan nasional lebih rendah dari Rp. 840 triliun, pengeluaran agregat adalah lebih besar dari pada pendapatan nasional. Keadaan ini akan mendorong para pengusaha untuk mendorong para pengusaha untuk menambah produksi mereka.

Kontraksi yaitu pada saat pendapatan nasional lebih besar dari 840 triliun pengeluaran agregat lebih kecil dari pendapatan nasional. Artinya banyak barang yang diproduksi oleh perusahaan tidak terjual. Keadaan ini mendorong perusahaan untuk mengurangi kegiatan mereka.

BAB IV PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR

4.1 Pengertian Sistem Perekonomian Tiga Sektor

Sistem perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor – sektor rumah tangga perusahaan dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional diantaranya pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran keatas konsumsi rumah tangga dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal tersebut akan menaikkan pengeluaran agregat.



Gambar 4.1 Aliran Pendapatan & Pengeluaran 3 Sektor

4.2 Peranan pemerintah dalam perekonomian 3 Sektor

1. Membuat efisiensi kegiatan ekonomial :
 - a. Menciptakan suasana ekonomi dan sosial yg mendorong kearah terciptanya kegiatan yang efisien (mis.Undang perburuhan, penetapan standart kualitas dll.)
 - b. Menciptakan persaingan bebas (kompetitif), menghapus kekuatan monopoli.
2. Menyelenggarakan sendiri berbagai kegiatan ekonomi.
3. Menjalankan kebijaksanaan moneter dan fiskal

4.3 Kebijakan Moneter Dan Fiskal

1. **Kebijaksan Moneter:** kebijaksanaan yg dijalankan oleh bank sentral utk.mengawasi jumlah penawaran uang dalam masyarakat.
2. **Kebijaksan Fiskal:** kebijakan pemerintah dalam mengatur keuangan Negara baik melalui bidang anggaran maupun bidang perpajakan dengan maksud untuk mempengaruhi, menstabilkan dan memajukan perekonomian nasional.

Kedua kebijaksanaan digunakan:

1. Mengatasi masalah ekonomi makro seperti: inflasi nilai tukar dan pengangguran
2. Menjaga agar faktor produksi digunakan secara efisien.
3. Memperbaiki distribusi pendapatan.

Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

1. **Pembiayaan Fungsional (*Functional Finance*)** pajak dipakai untuk pengaturan pengeluaran swasta dan bagi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.

2. **Pengelolaan Anggaran (*Manage Budget Approach*)** bahwa pajak pengeluaran pemerintah dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan perekonomian.
3. ***Stabilisasi Anggaran Otomatis*** maksudnya adalah pemerintah menentukan pajak sehingga menimbulkan surplus dalam kesempatan kerja penuh
4. **Anggaran Belanja Seimbang (*Balance Budget Approach*)**. bertujuan adanya anggaran belanja berimbang tanpa ada defisit anggaran.

4.4 Aliran Pendapatan Dan Syarat Keseimbangan

1. Aliran Pendapatan dan Pengeluaran

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan.

Tiga jenis aliran yang baru tersebut adalah :

- a. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama.
- b. Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah keatas barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan.
- c. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran keatas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah.

Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi
- b. Pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah.

Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber yaitu :

- a. Dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan utang oleh perusahaan
- b. Dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah.

2. Syarat keseimbangan

Keseimbangan:

$$Y = AE, \text{ atau } Y = C + I + G$$

Keterangan:

Y : penawaran agregat

C : konsumsi rumah tangga

AE : pengeluaran agregat

I : investasi perusahaan

G : pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa

Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian tiga sektor I dan G adalah suntikan kedalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan : $I + G = S + T$

Keseimbangan perekonomian 3 sektor: Penawaran agregat =
Pengeluaran agregat ($Y = AE$), atau:

$$Y = C + I + G$$

Pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, sehingga berlaku kesamaan berikut:

$$Y = C + S + T$$

Maka berlaku keseimbangan dalam pendapatan nasional, sebagai berikut:

$$C + I + G = C + S + T$$

$$I + G = S + T$$

Dalam perekonomian tiga sektor, I dan G merupakan **suntikan** ke dalam aliran sirkulasi dan S dan T merupakan **bocoran**. Sehingga keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku keadaan:

$$\text{Suntikan} = \text{Bocoran}$$

Contoh :

Jika diketahui: $C = 60 + 0,75 Y$ dan $S = 0,25 Y - 100$

$$I = 120$$

$$G = 60$$

Hitung Y keseimbangan!

(Ingat persamaan C diatas untuk pajak tetap $T = 40$)

Jawab:

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 60 + 0,75 Y + 120 + 60$$

$$Y = 0,75 Y + 240$$

$$Y - 0,75 Y = 240$$

$$0,25 Y = 240$$

$$Y = \mathbf{960}$$

$$I + G = S + T$$

$$120 + 60 = 0,25 Y - 100 + 40$$

$$180 = 0,25 Y - 60$$

$$Y = 960$$

4.5 Jenis Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Secara menyeluruh pengelompokan pajak dilakukan berdasarkan tiga faktor yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pihak yang Menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi atau perorangan dan badan yang harus dibayar secara periodik berdasarkan surat ketetapan pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap perbuatan atau peristiwa ekonomi dan dipungut tanpa surat ketetapan pajak. Contoh pajak tidak

langsung adalah Pajak Penjualan(PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, dan Cukai.

2. Berdasarkan Pihak yang Memungut

Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah.

a. Pajak Negara

Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pajak pusat diatur dalam suatu peraturan yang disebut undang-undang tentang perpajakan nasional. Pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contoh pajak negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan (PPn), dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Setiap daerah mempunyai objek pajak tersendiri. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam suatu peraturan yang disebut peraturan daerah (PERDA). Pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh pajak daerah adalah iuran kebersihan, retribusi masuk terminal, pajak tontonan, pajak reklame retribusi parkir, dan retribusi galian pasir.

3. Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif

a. Pajak subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk pajak subjektif ialah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk dalam pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM).

4. Unsur-Unsur Pajak

Terdapat unsur penting yang terdapat dalam pajak yaitu subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak.

a. Subjek Pajak

Subjek pajak yang disebut juga wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan wajib membayar pajak kepada negara. Menurut ketentuan setiap wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperoleh dengan cara mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah dimana wajib pajak berkedudukan atau bertempat tinggal.

Selanjutnya, setiap wajib pajak harus mengisi formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan menyampaikannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah dimana wajib pajak berkedudukan atau bertempat tinggal. SPT merupakan perhitungan pajak terutang dalam satu tahun pajak, biasanya selama 12 bulan.

b. Objek Pajak

Objek pajak adalah semua penghasilan yang benar-benar diterima atau diperoleh, baik dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha. Contohnya, laba usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya, gaji, honorarium, hasil sewa, bonus, komisi, dan bunga.

c. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak terhadap objek yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Secara umum, besar kecilnya pajak yang dibayar ditetapkan atau dihitung dengan sistem tarif proporsional, progresif, dan regresif.

1) Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap/sama untuk setiap jenis objek pajak. Semakin besar pendapatan yang diterima wajib pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, jika penghasilan kecil, maka pajak yang dibayar pun kecil.

2) Tarif Progresif

Tarif Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika objek pajak bertambah. Semakin besar pendapatan yang

diterima wajib pajak, maka semakin besar presentase pajak yang harus dibayar.

3) Tarif Degresif

Tarif Degresif adalah presentase tarif pajak yang semakin rendah jika objek pajak semakin bertambah. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak justru semakin rendah presentase pajak yang harus dibayarnya.

4.6 Efek Pajak Terhadap Konsumsi Dan Tabungan

Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan diantara pendapatan disposibel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara berikut:

$$\text{Pendapatan disposibel (Yd)} = \text{Pendapatan nasional (Y)} - \text{Pajak (T)}$$

Penurunan pendapatan dispoebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposibel sebanyak pajak yang dipungut.

Penurunan pendapatan disposibel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Walaupun bentuk sistem pajak yaitu pajak tetap pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan berikut:

$$\Delta C = MPC \times T$$

$$\Delta S = MPS \times T$$

1. Pengeluaran Pemerintah

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju. Pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah.

2. Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah

- a. Proyeksi jumlah pajak yang di terima: Dalam menyusun anggaran belanja pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang akan dapat di kumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan di lakukan.
- c. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai: Mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan tersebut seringkali membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang di peroleh oleh pajak.
- d. Pertimbangan politik dan keamanan: Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, keamanan. Keadaan seperti itu

akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar.

4.7 Multiplier Dalam Perekonomian Tiga Sektor

Perekonomian tiga sektor di lambangkan

- $Y = C + I + G$
 $Y = C_0 + bY_d + I + G$
 $Y = C_0 + b(Y - T) + I + G$
 $Y = C_0 + bY - bT + I + G$
 $Y = 1/(1-b) (C_0 - bT + I + G)$
- $I + G = S + T$
 $I + G = - C_0 + (1 - b)Y_d + T$
 $I + G = - C_0 + (1 - b)(Y - T) + T$
 $I + G = - C_0 + (1 - b)Y + bT$
 $Y = 1/(1-b) (C_0 - bT + I + G)$

Makna variabel

- Y = pendapatan nasional
- T = Pajak
- Y_d = pendapatan disposibel
- C = konsumsi
- C_0 = konsumsi dasar, yaitu konsumsi yang tidak tergantung pada Y
- I = investasi
- G = pengeluaran pemerintah
- S = saving

4.8 Kebijakan Dalam Masalah Ekonomi Makro

Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di bidang makro:

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah/anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya pengenaan pajak penghasilan dan pengenaan cukai rokok.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah/bank sentral dalam penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya pemerintah menerapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan peningkatan suku bunga bank.

3. Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah. Contohnya pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha kecil menengah.

4. Kebijakan Energi

Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang di dalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan konferensi minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh masyarakat.

5. Kebijakan Penetapan Harga

Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah.

6. Kebijakan Neraca Pembayaran

Merupakan kebijakan yang digunakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna memengaruhi nilai tukar. Contohnya larangan impor atau kuota produk tertentu dilakukan guna melindungi para pengusaha lokal dari serbuan produk asing.

BAB V

PEREKONOMIAN EMPAT SEKTOR

5.1 Analisis Perekonomian Empat Sektor

Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara – negara lain. Dalam perekonomian terbuka sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri dan disamping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara – negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi empat sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada empat sektor yaitu:

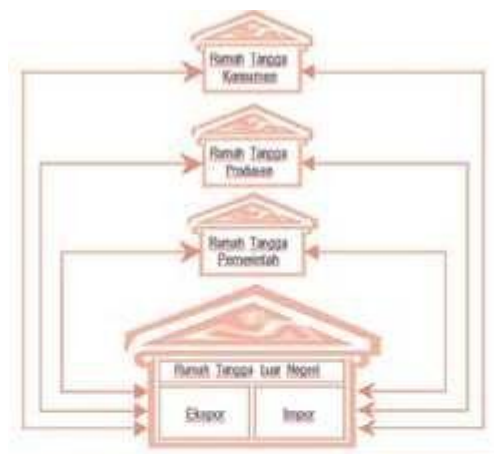
1. Rumah Tangga
2. Perusahaan
3. Pemerintah
4. Sektor Luar Negeri

Model perekonomian selanjutnya adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor impor dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya.

Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibanding eksportnya. Sebaliknya, suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar dari impornya.

Dalam perekonomian empat sektor kita akan melihat dua kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan (rumah tangga produksi), dan pemerintah. Kegiatan kelompok pelaku ekonomi masyarakat luar negeri tersebut membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Kelompok pelaku ekonomi dalam negeri juga membentuk sistem perputaran kegiatan ekonomi. Jadi, masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri terdiri atas rumah tangga konsumsi, perusahaan (rumah tangga produksi), dan pemerintah. Mereka saling berinteraksi, sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri.

Diagram aliran interaksi perekonomian empat sektor dijelaskan dalam Gambar 5.1 berikut.



Keterangan:

→ = Aliran Barang atau Jasa

→ = Aliran Devisa

Dari gambar di atas dapat dilihat perbedaan interaksi antarpelaku ekonomi dalam perekonomian sederhana (Bagan 2.1), perekonomian tertutup (Bagan 2.2), dan perekonomian terbuka (Bagan 2.3). Hampir semua negara di dunia pada saat ini melakukan interaksi dengan negara lain, sehingga interaksi ekonomi juga melibatkan sektor luar negeri. Sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintah merupakan perekonomian domestik. Perekonomian dikatakan tertutup (*closed economy*) jika tidak melakukan interaksi dengan sektor luar negeri. Adapun perekonomian suatu negara dikatakan terbuka (*open economy*) apabila terjadi interaksi dengan sektor luar negeri yang ditandai dengan adanya mekanisme ekspor dan impor. Ekspor merupakan aliran pendapatan dari perekonomian luar negeri ke perekonomian domestik. Adapun impor merupakan aliran pengeluaran dari perekonomian domestik ke perekonomian luar negeri.

Model perekonomian yang meliputi kegiatan ekspor dan impor dinamakan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Dalam model ini ada 2 aliran baru di dalam sirkulasi aliran pendapatan:

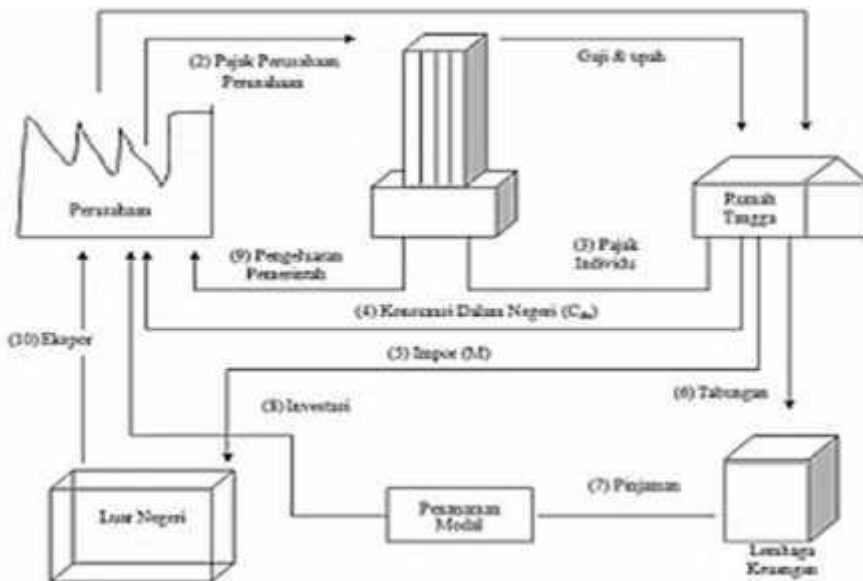
1. Aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan.
2. Aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan.

Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Aspek terakhir ini adalah multiplier dalam perekonomian terbuka.

5.2 Sirkulasi Aliran Pendapatan

Dalam perekonomian terbuka sektor-sektor ekonomi dibedakan kepada 4 golongan: perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga, berupa: gaji, upah, sewa, bunga, keuntungan ditunjukkan oleh aliran 1. Aliran pendapatan ini dikurangi pajak keuntungan perusahaan (aliran 2), tetapi belum dikurangi pajak pendapatan RT (aliran 3). RT dalam perekonomian menggunakan pendapatan mereka untuk transaksi sebagai berikut:

1. Membeli barang dan jasa yang diproduksi sektor perusahaan dan pengeluaran konsumsi sebagai konsumsi keatas barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri atau C_{dn} (aliran 4).
2. Membayar pajak pendapatan kepada pemerintah, yaitu oleh aliran 3.
3. Mengimpor, yaitu membeli barang-barang yang yang diproduksi negara lain, yaitu oleh aliran 5.
4. Menabung sisa pendapatan yang diperoleh ke dalam lembaga keuangan, yaitu oleh aliran 6.



Gambar 5.2 Aliran-aliran Pendapatan Dalam Perekonomian Terbuka

Disamping itu aliran keluar untuk membayar impor mewujudkan aliran pengeluaran kesektor perusahaan, yaitu aliran oleh pembayaran keatas ekspor sektor perusahaan. Aliran pendapatan dari negara-negara luar oleh aliran 10. aliran 8 adalah pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan untuk membeli barang-barang kebutuhan administrasi pemerintah dan barang modal untuk investasi pemerintah.

5.3 Keseimbangan Pendapatan Nasional

Keseimbangan perekonomian terbuka terlebih dahulu diterangkan secara aljabar persamaan keseimbangan dalam perekonomian tersebut dan ciri-ciri fungsi ekspor dan impor.

1. Persamaan Keseimbangan

Dalam perekonomian terbuka barang dan jasa diperjualbelikan terdiri dari yang diproduksi di dalam negeri, yaitu pendapatan

nasional dan yang diimpor dari negara-negara lain. Dengan demikian dalam perekonomian terbuka penawaran agregat (AE) terdiri dari pendapatan nasional (Y) dan impor (M). dalam persamaan:

$$AS = Y + M$$

Aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka menunjukkan pengeluaran agregat keatas pendapatan nasional meliputi 4 komponen yaitu: konsumsi RT (C_{dn}), investasi perusahaan (I), pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor (X). Maka pengeluaran agregat keatas produksi dalam negeri (AE_{dn}) adalah:

$$AE_{dn} = C_{dn} + I + G + X$$

Dalam perekonomian terbuka perbelanjaan agregat (AE) meliputi perbelanjaan agregat keatas produksi dalam negeri dan pengeluaran impor, maka:

$$AE = AE_{dn} + M$$

Atau

$$AE = C_{dn} + I + G + X + M$$

Konsumsi RT terdiri dari pengeluaran keatas produksi dalam negeri (C_{dn}) dan pengeluaran keatas barang impor (M). Maka keseluruhan konsumsi RT (C) adalah:

$$C = C_{dn} + M$$

Dengan menggantikan $C_{dn} + M$ menjadi C, persamaan perbelanjaan agregat dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$AE = C + I + G + X$$

Perekonomian akan mencapai keseimbangan, apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Dalam perekonomian terbuka keadaan keseimbangan tersebut adalah:

$$Y + M = C + I + G + X$$

dimana $Y + M$ adalah penawaran agregat dan $C + I + G + X$ adalah pengeluaran agregat. persamaan itu disederhanakan menjadi:

dari persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keseimbangan menurut pendekatan penawaran agregat permintaan agregat. Dalam pendekatan suntikan – bocoran, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila: $S + T + M = I + G + X$.

Syarat keseimbangan ini dibuktikan dalam uraian berikut. Aliran pendapatan yang diwujudkan dari kegiatan memproduksi pendapatan nasional akan digunakan sebagai berikut:

1. Membiayai pengeluaran konsumsi ke atas barang buatan dalam negeri (C_{dn}) dan barang impor (M). Maka keseluruhan pengeluaran konsumsi adalah:

$$C = C_{dn} + M$$

2. Membayar pajak (T), yaitu pajak keuntungan perusahaan dan pajak pendapatan RT.
3. Menyisihkan pendapatan untuk ditabung (S) di lembaga keuangan.

Ditinjau dari segi pendapatan, pendapatan nasional dapat dihitung, dengan formula berikut:

$$Y = C_{dn} + M + S + T$$

Oleh karena: $C = C_{dn} + M$

maka : $Y = C + S + T$

Menurut pendekatan penawaran agregat – permintaan agregat keseimbangan dicapai pada keadaan dimana:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Apabila Y digantikan dengan: $C + S + T$, persamaan keseimbangan diatas dapat diganti menjadi:

$$C + I + G + (X - M) = C + S + T$$

Apabila masing-masing ruas dikurangi dengan C dan M dipindahkan ke ruas kanan, maka persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi:

$$I + G + X = S + T + M$$

Terbukti dari uraian diatas bahwa syarat keseimbangan lain dalam perekonomian 4 sektor adalah:

$$I + G + X = S + T + M$$

2. Penentu Ekspor

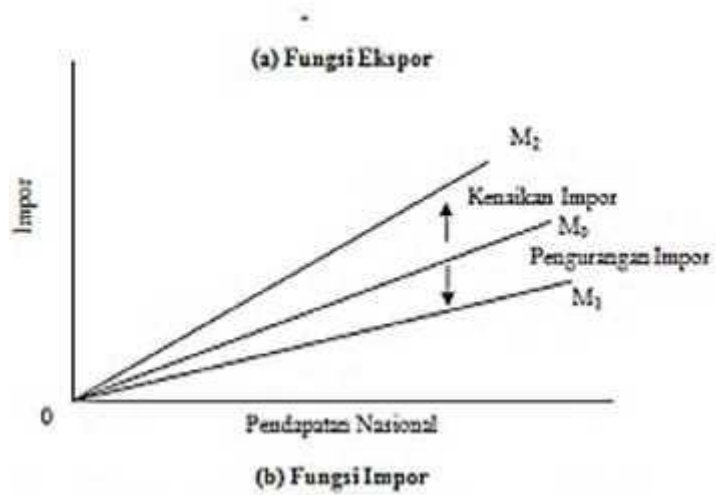
Ekspor yang dilakukan suatu negara bergantung kepada faktor. Seseuatu negara dapat mengekspor barang-barang yang dihasilkannya kenegara-negara lain apabila barang-barang tersebut diperlukan negara-negara lain dan mereka tidak dapat menghasilkan sendiri barang-barang tersebut. Faktor yang lebih penting adalah kemampuan dari negara tersebut memproduksi barang-barang yang dapat bersaing di pasaran luar negeri.

3. Penentu Impor

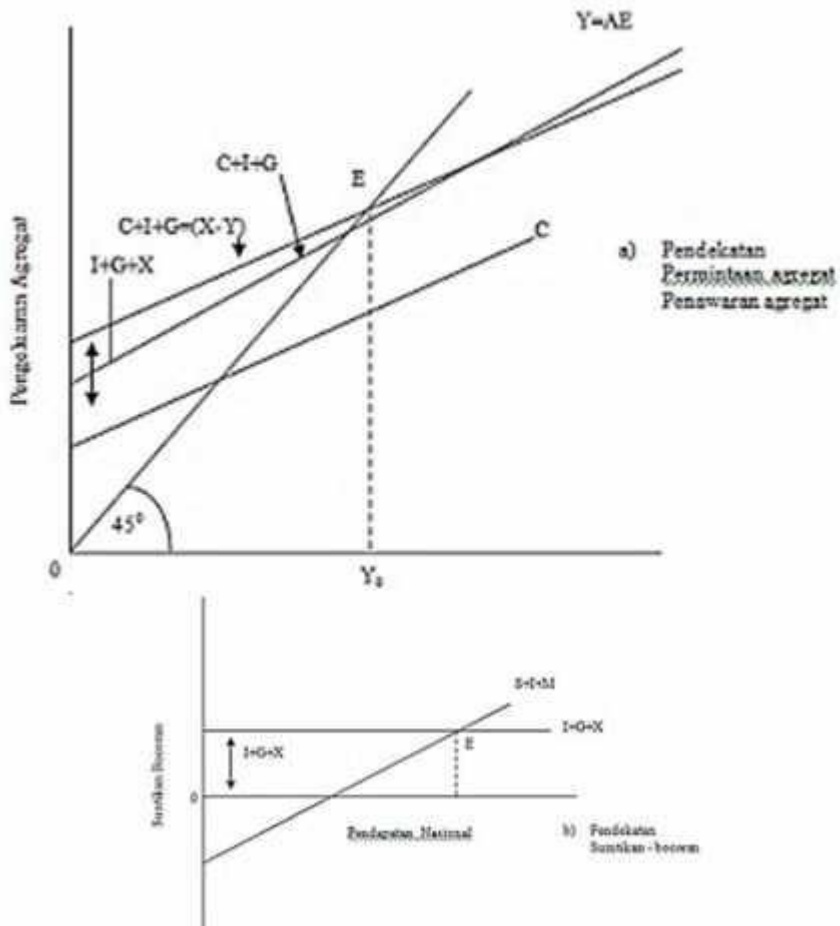
Besarnya impor yang dilakukan sesuatu negara-negara lain di tentukan oleh sampai dimana kesanggupan barang-barang yang diproduksi di negara-negara lain untuk bersaing dengan barang yang dihasilkan di negara lain.



Gambar 5.3 Fungsi Ekspor dan Impor



Gambar 5.4 Keseimbangan Dalam Perekonomian Terbuka



4. Grafik Keseimbangan Pendapatan Nasional

Grafik (a) menggambarkan keseimbangan berdasarkan pendekatan penawaran agregat permintaan agregat, sedangkan grafik (b) menunjukkan keseimbangan menurut pendekatan suntikan bocoran.

Dimisalkan besar pengeluaran pemerintah dan investasi perusahaan berturut-turut adalah G dan I dan ekspor ke luar negeri adalah X . konsumsi RT yang meliputi impor adalah C dan nilai impor

adalah M . Maka sesuai dengan analisis persamaan keseimbangan, $C + I + G + (X - M)$.

5.4 Multiplier Dalam Perekonomian Terbuka

Nilai multiplier dalam perekonomian terbuka akan menjadi kecil tersebut disebabkan dari multiplier 3 sektor. Multiplier yang semakin kecil tersebut disebabkan oleh pemisalan bahwa impor adalah proporsional nilainya dengan pendapatan nasional, sedangkan ekspor adalah bersifat pengeluaran otonomi.

**Tabel 5.1 Proses Multiplier Dalam Perekonomian Terbuka
(Dalam Milyar Rupiah)**

Tahap Multiplier	Pertambahan Pendapatan Nasional (ΔY)	Pertambahan Pajak (ΔT)	Pertambahan Pendapatan Disposebel (ΔY_d)	Pertambahan konsumsi (ΔC_d)	Pertambahan Tabungan (ΔM)	Pertambahan Tabungan (ΔS)
I	$\Delta Y_1 = \Delta X = 200$	40	160	100	20	40
II	$\Delta Y_2 = \Delta C_{dn} = 100$	20	80	50	10	20
III	$\Delta Y_3 = \Delta C_{dn} = 50$	10	40	25	5	10
dstnya
Jumlah Total	$\Delta Y = 400$	$\Delta T = 80$	$\Delta Y_d = 320$	$\Delta C_{dn} = 200$	$\Delta M = 40$	$\Delta S = 80$

Contoh diatas menunjukkan multiplier dalam perekonomian terbuka adalah:

$$\text{Multiplie} = \frac{1}{1 - \text{MPC}_{cn}}$$

Dimana MPC_{dn} adalah kecondongan menggunakan marginal pendapatan nasional untuk perekonomian 4 sektor dan dapat dihitung dengan formula:

$$\text{MPC}_{dn} = \frac{\Delta C_{cn}}{\Delta Y}$$

Dalam contoh angka menunjukkan multiplier = 2, berarti kenaikan ekspor sebanyak Rp. 200 milyar akan menambah pendapatan nasional sebanyak Rp. 400 milyar.

5.5 Perhitungan Multiplier Secara Aljabar

Untuk menerangkan perhitungan multiplier secara aljabar digunakan pemisalan-pemisalan sebagai berikut:

1. Fungsi konsumsi adalah $C = a + b Y_d$
2. Pajak proporsional adalah $T = tY$
3. Investasi perusahaan adalah I_0
4. Pengeluaran pemerintah adalah G_0
5. Ekspor adalah X_0
6. Impor adalah $M = mY$

Berdasarkan kepada pemisalan-pemisalan diatas pendapatan nasional dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan:

$$\begin{aligned}
 Y &= C + I + G + (X - M) \\
 Y &= a + bY_d + I_0 + G_0 + X_0 - mY \\
 Y &= a + b(Y - tY) + I_0 + G_0 + X_0 - mY \\
 Y - bY + btY + mY &= a + I_0 + G_0 + X_0 \\
 Y(1 - b + bt + m) &= a + I_0 + G_0 + X_0 \\
 Y &= \frac{1}{1 - b + bt + m} (a + I_0 + G_0 + X_0)
 \end{aligned}$$

Seterusnya misalkan ekspor bertambah sebanyak X , kenaikan ini mewujudkan proses multiplier dan pendapatan nasional bertambah menjadi Y_1 yang bernilai:

$$Y = \frac{1}{1 - b + bt + m} (a + I_0 + G_0 + \Delta X_0)$$

Nilai kenaikan pendapatan nasional ($\Delta Y = Y_1 - Y$) adalah:

$$Y = \frac{1}{1-b+bt+m} (a + I_0 + G_0 + \Delta X_0) - \frac{1}{1-b+bt+m} (a + I_0 + G_0 + X_0)$$

Penghitungan diatas menunjukkan dalam perekonomian terbuka nilai multiplier dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Multiplier} = \frac{1}{1-b+bt+m} \Delta X$$

Dimana: b = kecondongan mengkonsumsi marginal

t = tingkat (%) pajak

m = tingkat (%) impor

dalam contoh angka yang dibuat sebelum ini $b = 0,75$, $t = 0,20$ dan $m = 0,10$

Dengan demikian nilai multiplier adalah:

$$\begin{aligned} \text{Multiplier} &= \frac{1}{1-0,75+0,75(0,2)+0,1} \\ &= \frac{1}{1-0,75+0,15+0,1} \\ &= \frac{1}{0,5} \\ &= 2,0 \end{aligned}$$

BAB VI

TEORI KONSUMSI DAN INVESTASI

6.1 Teori Konsumsi

Pemikiran terhadap Teori konsumsi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes sesudah terjadinya Depresi Ekonomi tahun 1929-1930 melalui bukunya yang berjudul “*The General Theory of Employment, Interest and Money*”. Pemikiran Keynes tentang teori konsumsi kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Simon Kuznets, James Duesenberry, Milton Friedman, dan Franco Modigliani.

1. Teori Keynes – Absolut Income Hypothesis

Menurut Keynes, pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dalam perekonomian tergantung dari besarnya pendapatan. Perbandingan antara besarnya konsumsi dengan jumlah pendapatan disebut kecenderungan mengkonsumsi ($MPC = Marginal Propensity to Consume$). Semakin besar MPC semakin besar pula pendapatan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi dan sebaliknya.

Pada kondisi negara yang MPC-nya rendah, maka akan menyebabkan selisih antara produksi nasional (dengan asumsi *full employment*) dengan tingkat konsumsi (penggunaan produk) menjadi semakin besar. Agar mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, para pengusaha perlu melakukan investasi sebesar selisih antara tingkat konsumsi dan produksi tersebut. Jika besarnya investasi tidak mencapai jumlah tersebut, maka akan terjadi pengangguran. Karena kondisi tersebut dalam kondisi nyata tidak selalu tercapai, maka pengangguran

akan selalu ada. Fungsi konsumsi Keynes adalah fungsi konsumsi jangka pendek.

Fungsi konsumsi Keynes dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi Konsumsi Keynes: $C = C_0 + cY_d$

Dimana:

- $C_0 > 0$.

C_0 adalah Konsumsi subsidi (*The Otonom Consumption*) yaitu sejumlah konsumsi yang diterima oleh konsumen apabila pendapatan mereka tidak ada, atau $Y = 0$.

- Y_d = Pendapatan Disposable atau pendapatan yang siap dikonsumsi

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

T_x adalah Pajak dan T_r adalah Subsidi atau transfer

- b. Rata-rata konsumsi ($APC = \text{Average Propensity to Consume}$) adalah ratio antara jumlah konsumsi terhadap pendapatan, $APC = C/Y$.
- c. Kecenderungan tambahan mengkonsumsi ($MPC = c = DC/DY = \text{Marginal Propensity to Consume}$) adalah sejumlah perubahan konsumsi sebagai akibat dari berubahnya tingkat pendapatan.
- d. Rata-rata kecenderungan mengkonsumsi adalah lebih besar dari pada kecenderungan mengkonsumsi marjinal atau $APC > MPC$
- e. APC tidak boleh konstan jika C_0 adalah tidak nol. Jika $C_0 = 0$ maka fungsi konsumsi akan mengurangi “*absolute income hypothesis*” dimana konsumsi sebanding dengan pendapatan. Dan hal ini tidak konsisten dengan Keynes.

2. *Teori Simon Kuznets - Konsumsi Jangka Panjang*

Apabila Keynes hanya mengeluarkan fungsi konsumsi jangka pendek saja, Simon Kuznets menemukan fungsi konsumsi jangka panjang yaitu $C = MPC \cdot Y$.

Menurut Kuznets, *tidak ada perubahan yang signifikan terhadap proporsi tabungan terhadap pendapatan ketika pendapatan semakin meningkat*, sehingga dalam jangka panjang, fungsi konsumsi berbentuk stabil.

Asumsi dasar Studi Kuznets

- a. Pajak perorangan dan pembayaran transfer adalah kecil (dalam periode ini)
- b. Oleh karena itu adalah masuk akal jika menggunakan pendapatan total (GNP) sebagai proxy untuk pendapatan disposal (Y_d)
- c. Jika terdapat hubungan antara konsumsi dan pendapatan dispoebel, maka juga harus ada hubungan antara konsumsi dan GNP

3. *James Duessenberry – The Relative Income Hypothesis*

James Stemble Duesenberry (18 Juli 1918 – 5 Oktober 2009) adalah seorang ekonom Amerika yang membuat sumbangan penting bagi analisis pendapatan dan kesempatan kerja Keynesian, dengan bukunya yang diterbitkan pada tahun 1949 yang berjudul "*Income, Saving, and Consumers Behavior Theory*". Namun Duessenbery menolak dua asumsi dasar yang telah dikemukakan Simon Kuznets yaitu:

- a. Setiap konsumsi keluarga merupakan keinginan sendiri, bukan akibat pengaruh dari lingkungannya.

- b. Konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan tahun itu, dan tidak dipengaruhi pendapatan tahun sebelumnya.

James Desenbery mengemukakan pendapatnya bahwa *apabila pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluarannya untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi ini, mereka terpaksa mengurangi saving.*

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi adalah:

1. Distribusi pendapatan nasional.
2. Banyaknya kekayaan masyarakat dalam bentuk alat- alat likuit.
3. Banyaknya barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat

Dari hasil penelitiannya, dengan mengumpulkan data konsumsi dan pendapatan disepel, fungsi konsumsi yang dibentuk oleh Duessenbery adalah sebagai berikut:

$$C_t = (C_0 - cY_0)Y_t$$

Y_t = Pendapatan disposable selama tahun t

Y_0 = Pendapatan paling tinggi yang pernah diperoleh satu tahun sebelumnya.

Dari hasil penelitiannya, Duessenbery membuat kesimpulan:

- a. Konsumsi seseorang akan tergantung dari penghasilan saat ini dan penghasilan tertinggi tahun sebelumnya. (**Ratchet Effect**)
- b. Perilaku konsumsi seseorang akan tergantung pula dengan perilaku konsumsi lingkungannya (**Demonstration Effect**)

4. Teori Milton Friedman – *Permanent Income Hypotesis*

Milton Friedman adalah seorang ekonom yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, dalam menyebarluaskan gagasan pasar bebasnya

Adam Smith. Karya terkenalnya muncul ditahun 1957 dengan judul, “*A Theory of the Consumption Function*”, Friedman menunjukkan bahwa konsumsi tahunan masyarakat adalah sebuah fungsi untuk menunjukkan tingkat pendapatan yang diinginkan. Teori konsumsi Friedman ini kemudian dikenal sebagai *Permanent Income Hypothesis*.

Teori *Permanen Income Hypothesis* menjelaskan tentang perilaku konsumen yang ingin memperoleh kepuasan maksimum dengan mengkonsumsi barang sesuai anggarannya. Kepuasan maksimum akan tercapai saat kemiringan kurva indiferent atau *slope indifferent curve sama dengan budget line*.

Tiga aspek pemikiran Friedman adalah:

- a. Studi tentang fungsi konsumsi
- b. Argumennya tentang kesulitan dan permasalahan dalam penerapan kebijakan stabilitas
- c. Kontribusinya pada teori dan sejarah moneter

□ Berlawanan dengan penekanan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh ahli ekonomi Keynesian, Friedman menyatakan bahwa uang dan kebijakan moneter berperan penting dalam menentukan aktifitas ekonomi. Argumennya tentang pentingnya arti uang berasal dari *teori uang kuantitatif* ($MV=PQ$), yang berarti bahwa jumlah uang dalam perekonomian (M) dikalikan jumlah waktu yang digunakan tiap dolar dalam satu tahun untuk membeli barang (V) harus sama dengan output ekonomi yang terjual tahun itu (PQ).

□ Friedman mengakui bahwa daripada membeli barang orang-orang lebih suka memegang uang karena alasan lain yaitu karena keamanan

atau karena mereka berpikir bahwa harga persediaan dan harga aset-aset yang lain mungkin akan turun. Namun studi empiris yang dilakukan Friedman menemukan bahwa faktor-faktor ekonomi ini hanya berdampak kecil pada kecepatan dan dampaknya ini cenderung menurun dari waktu ke waktu. Karena kecepatan uang relative stabil, maka jumlah uanglah yang terutama berdampak pada tingkat aktivitas ekonomi.

□ Friedman menyatakan bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi terbaik karena mempromosikan kebebasan politik, dan karena pasar dapat membantu mengimbangi kekuatan politik.

□ Dengan kata lain, hipotesis Friedman ini menjelaskan bahwa konsumsi pada saat ini tidak tergantung pada pendapatan saat ini tetapi lebih pada *Expected Normal Income (rata-rata pendapatan normal)* yang disebut sebagai *permanent income*. Fungsi konsumsinya adalah sebagai berikut:

$$vC = f(YP, i)$$

$$vYP = \textit{permanent income}$$

$$v_i = \textit{real interest rate}$$

Jadi apabila pendapatan konsumen itu tidak stabil, seperti pada gambar di atas, maka selalu terjadi proses *saving* dan *dissaving*. Dalam jangka panjang, *real interest rate* dianggap stabil, sehingga fungsi konsumen menjadi persentase dari *permanent income*.

5. Teori Franco Modigliani – Life Cycle Hypothesis

Pendekatan ini dikemukakan oleh Albert Ando, Richard Brumberg dan Franco Modigliani. Mereka berpendapat bahwa pendapatan relatif lebih rendah pada usia muda dan usia lanjut. Dengan pola konsumsi

manusia seperti huruf C, maka akan terjadi *dissaving* (mengurangi tabungan) ketika usia muda dan usia lanjut. Sedangkan pada usia produksi, terjadi peningkatan saving. Namun mereka berpendapat bahwa dalam jangka panjang rata-rata tabungan (*expected saving*) $E(S) = 0$.

Pencetus dari siklus-hidup hipotesis (*life cycle hypothesis*) ini, mencoba untuk menjelaskan tingkat tabungan dalam perekonomian. Modigliani menyatakan bahwa konsumen akan menstabilkan tingkat konsumsi sepanjang masa hidupnya, misalnya dengan menabung selama masa kerja dan mengeluarkannya pada masa pensiun.

Menurut Modigliani, konsumsi seseorang dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu:

- a. Pendapatan saat ini
- b. Kekayaan yang terakumulasi (akibat tabungan masa lalu) dan
- c. Harapan penghasilan di masa depan.

Jika pendapatan pada masa yang akan datang semakin tinggi (usia muda ke usia produktif) maka orang itu akan meningkatkan konsumsinya, dan akan mengurangi konsumsinya pada saat penghasilannya mulai menurun (usia produktif ke usia lanjut). Hal sama terjadi pada orang yang memiliki kekayaan yang banyak (akumulasi tabungan, warisan, dan lain-lain), akan mengkonsumsi lebih banyak dibandingkan orang yang tidak memiliki kekayaan, sehingga terlihat pada saat usia lanjut konsumsi masih tetap tinggi, karena adanya akumulasi kekayaan yang dikumpulkan saat masih produktif (konsumsi > saving).

Modigliani *life cycle hypothesis* menyatakan bahwa manusia akan merencanakan konsumsi dan tabungannya untuk selama hidupnya dan akan mengalokasikannya secara optimal. Asumsinya:

- a. Konsumen akan pensiun pada umur R dan meninggal pada usia T
- b. Ia akan bekerja dari $t = 0$, dan memperoleh pendapatan sebesar Y
- c. Besarnya konsumsi selama hidupnya adalah $C_1 = C_2 = \dots C_T$, berarti tingkat bunga adalah nol.
- d. Tidak ada ketidak pastian tentang Y, T dan R dimasa datang
- e. Tidak ada kekayaan pada awalnya.

Keputusan untuk mengkonsumsi berdasarkan pada:

- Pendapatan yang diperoleh selama hidupnya = R.Y
- Tingkat konsumsi selama hidupnya = C.T
- Sehingga : $C.T = R.Y$
- Kekayaan awal = W
- T-t adalah sisa hidup $\rightarrow t =$ waktu
- R-t adalah masa pensiun
- Sehingga : $C (T-t) = W + (R-t).Y$ atau
- Fungsi konsumsi ini dapat digunakan untuk menjelaskan teori

konsumsi Kuznets yaitu:

- 1) Dalam jangka pendek : Perubahan Y tidak mempengaruhi W, dan peningkatan Y akan menurunkan APC
- 2) Dalam jangka panjang : Kenaikan Y akan menaikkan W, tetapi APC tidak berubah (dalam jangka panjang) dengan adanya perubahan Y

Implikasi dari model *Life Cycle Hypothesis* ini adalah:

- a. Manusia akan menabung selama hidupnya (orang muda akan menabung lebih banyak)
- b. Tabungan agregat tergantung pada trend demografi
- c. Secara keseluruhan, apabila pertumbuhan penduduk adalah tetap, maka tabungan juga tetap (konstan), pertumbuhan populasi akan meningkatkan tabungan.
- d. Kenaikan pajak dan asuransi pensiun akan menurunkan tingkat tabungan.

6.2 Pengertian Fungsi Konsumsi

Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian.

Persamaannya: $C = a + bY$

Keterangan:

- C = tingkat konsumsi
- a = konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional 0
- b = kecondongan konsumsi marginal
- Y = tingkat pendapatan nasional

6.3 Kecenderungan Mengonsumsi (*Propensity to Consume*)

Kecenderungan mengonsumsi dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Kecenderungan mengonsumsi marginal
- b. Kecenderungan mengonsumsi rata-rata

Kecenderungan mengonsumsi marginal yaitu perbandingan antara pertambahan (ΔC) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposabel (ΔY_d).

$$MPC = \Delta C / \Delta Y_d$$

Keterangan:

MPC = *Marginal Propensity to Consume* (kecondongan mengonsumsi marginal)

ΔC = pertambahan konsumsi

ΔY_d = pertambahan pendapatan

Kecenderungan Mengonsumsi Rata-rata (*Average Propensity to Consume*). Kecenderungan mengonsumsi rata-rata yaitu perbandingan antara tingkat konsumsi (C) dengan tingkat pendapatan disposabel serta konsumsi itu dilakukan (Y_d).

$$APC = C / Y_d$$

Keterangan:

APC = konsumsi rata-rata

C = tingkat konsumsi

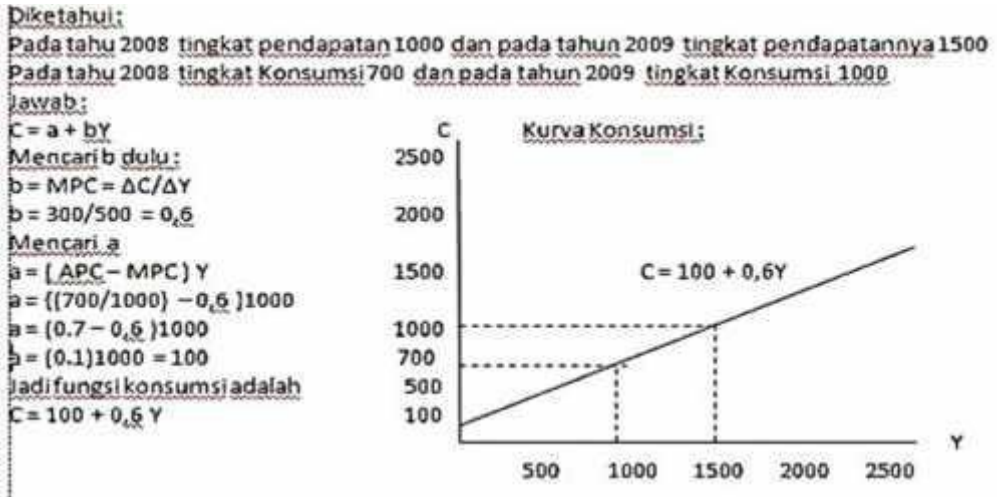
Y_d = besarnya pendapatan disposebel

Untuk lebih jelasnya lihat tabel APC dan MPC di bawah ini:

Tahun	Y	C	APC	MPC
2004	110	120	1,09	
2005	140	140	1,00	0,67
2006	170	160	0,94	0,67
2007	200	180	0,90	0,67
2008	230	200	0,87	0,67

Contoh mencari fungsi konsumsi dan menggambar grafiknya:

Jawab:



6.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi

Kita telah mempelajari faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi individu, antara lain pendapatan yang diterima, tingkat harga, selera. Kali ini, kita akan mencoba membahasnya dari segi ekonomi makro. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseluruhan konsumsi rumah tangga diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, antara lain faktor ekonomi, demografi, dan faktor nonekonomi, ada juga yang membedakan faktor objektif dan subjektif.

1. Pengertian Fungsi Tabungan

Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian

$$S = -a + (1 - b) Y$$

Keterangan:

S = besarnya tabungan (save)

- a = konsumsi yang harus dipenuhi pada saat pendapatan nol
- 1-b = marginal propensity to save
- Y = pendapatan nasional

2. *Marginal Propensity to Save (MPS)*

Kecenderungan menabung marginal merupakan perbandingan antara pertambahan tabungandengan pertambahan pendapatan disposebel.

$$MPS = \Delta S / \Delta Y_d$$

Keterangan:

MPS = *Marginal Propensity to Saving* (kecondongan menabung marginal)

ΔS = pertambahan tabungan

ΔY_d = pertambahan pendapatan

3. *Average Propensity to Save (APS)*

Kecondongan menabung rata-rata merupakan perbandingan antara tingkat tabungan (S) dengan tingkat pendapatan. Hubungan antara pendapatan, dan tabungan dinyatakan dalam rumus:

$$Y = C + S$$

Keterangan:

Y = Pendapatan

C = konsumsi

S = Tabungan

Antara MPC dengan MPS mempunyai hubungan yang cukup erat, hal in bisa kita buktikan dengan mempergunakan persamaan sebagai berikut:

$$MPS + MPC = 1$$

$$MPC = 1 - MPS \text{ atau}$$

$$MPS = 1 - MPC$$

Diketahui:

Pada tahun 2008 tingkat pendapatannya 1000 dan pada tahun 2009 tingkat pendapatannya 1500

Pada tahun 2008 tingkat tabungannya 300 dan pada tahun 2009 tingkat tabungannya 500

Jawab:

$$S = -a + (1 - b)Y$$

$$1 - b = MPS = \Delta S / \Delta Y$$

$$MPS = 200 / 500 = 0,4$$

$$S = -a + 0,4Y$$

$$300 = -a + 0,4(1000)$$

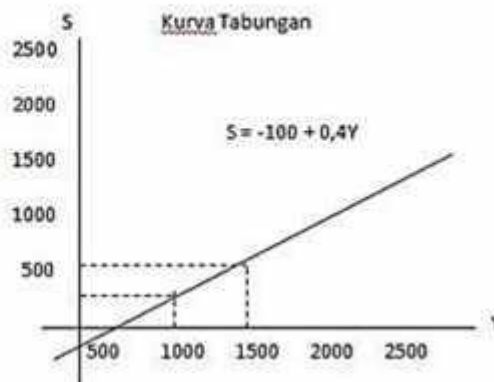
$$300 = -a + 400$$

$$300 - 400 = -a$$

$$-100 = -a$$

Jadi fungsi tabungannya:

$$S = -100 + 0,4Y$$



4. Keseimbangan Tingkat Konsumsi

Keseimbangan konsumsi terjadi apabila semua pendapatan habis dipakai untuk konsumsi. Jadi dapat dirumuskan: $Y = C$

Dapat dicontohkan dari fungsi konsumsi pada contoh di atas dapat dihitung:

$$Y = C$$

$$Y = 100 + 0,6Y$$

$$Y - 0,6Y = 100$$

$$0,4Y = 100$$

$$Y = 250$$

6.5 Teori Investasi

Secara singkat investasi (*investment*) dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Istilah lain dari

investasi adalah pemupukan modal atau akumulasi modal. Dengan demikian, di dalam makroekonomi pengertian investasi tidak sama dengan modal. Dalam makroekonomi, investasi memiliki arti yang lebih sempit yaitu jumlah yang dibelanjakan sektor bisnis untuk menambahkan stok modal dalam periode tertentu. Sedangkan modal merupakan stok ketika nilai uang dari gedung-gedung, mesin-mesin, dan inventaris lainnya adalah tetap pada suatu waktu.

1. Teori Investasi dari Keynes

John Maynard Keynes mendasarkan teori permintaan investasi atas konsep efisiensi marjinal kapital (*marginal efficiency of kapital* atau MEC). Sebagai suatu definisi kerja, MEC dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan bersih yang diharapkan (*expected net rate of return*) atas pengeluaran kapital tambahan. Tepatnya, MEC adalah tingkat diskonto yang menyamakan aliran perolehan yang diharapkan dimasa yang akan datang dengan biaya sekarang dari kapital tambahan.

2. Teori Akselerator

Teori akselerator ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antara permintaan akan barang modal dan permintaan akan produk akhir, dimana permintaan akan barang modal dilihat sebagai permintaan turunan dari permintaan akan barang atau produk akhir. Dalam bentuk yang paling sederhana, teori tersebut mulai dengan mengasumsikan adanya *capital-output ratio* (COR) yang tertentu, yang ditentukan oleh kondisi teknis produksi.

3. Teori Dana Internal

Teori dana internal tentang investasi (*internal funds theory of investment*) mengatakan bahwa stok kapital dan investasi yang diinginkan, bergantung pada tingkat keuntungan. Beberapa penjelasan

tentang hal ini telah dikemukakan oleh sejumlah ahli diantaranya adalah Jan Tinbergen yang mengatakan bahwa keuntungan yang terjadi (*realized profits*) secara akurat merefleksikan keuntungan yang diharapkan (*expected profits*), maka investasi memiliki hubungan positif dengan *realized profits*.

Jadi, singkatnya teori ini mengatakan stok kapital dan investasi yang diinginkan ditentukan oleh keuntungan; sedangkan menurut teori akselerator, investasi ditentukan oleh tingkat *output*. Karena dua teori tersebut memiliki pandangan yang berbeda menyangkut faktor-faktor penentu stok kapital yang diinginkan, maka dengan sendirinya kedua teori ini juga memiliki implikasi kebijakan yang berbeda pula. Bagi teori akselerator, kebijakan fiskal yang ekspansif cenderung menyebabkan tingkat output semakin tinggi, yang selanjutnya meningkatkan stok kapital yang diinginkan dan investasi. Di pihak lain, suatu penurunan pajak pendapatan perusahaan tidak akan meningkatkan stok kapital yang diinginkan dan investasi, tetapi meningkatkan ketersediaan dana internal. Sebaliknya, bagi teori dana internal, penurunan di dalam pajak pendapatan perusahaan, akan menyebabkan kenaikan yang signifikan di dalam stok kapital dan investasi yang diinginkan. Selain itu, kebijakan fiskal yang ekspansif juga tidak memiliki pengaruh langsung atau pengaruhnya kecil terhadap stok kapital yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kebijakan fiskal mempengaruhi *output*, bukan ketersediaan dana internal. Kebijakan fiskal yang ekspansif mungkin memiliki pengaruh tidak langsung sebab keuntungan cenderung meningkat kalau *output* meningkat.

4. Teori Neoklasik

Menurut teori ini, stok kapital yang diinginkan ditentukan oleh output dan harga dari jasa kapital relatif terhadap harga *output*. Harga jasa kapital yang gilirannya bergantung pada barang-barang modal, tingkat bunga, dan perlakuan pajak atas pendapatan perusahaan. Jadi, menurut teori ini perubahan di dalam *output* atau harga dari jasa kapital relatif terhadap harga *output* akan mengubah atau mempengaruhi, baik stok kapital maupun investasi yang diinginkan.

Teori Neoklasik mengatakan bahwa tingkat bunga merupakan faktor penentu dari stok kapital yang diinginkan. Jadi, kebijakan moneter, melalui efek atau pengaruhnya atas tingkat bunga dapat mempengaruhi stok kapital dan investasi yang diinginkan.

5. Teori q dari Tobin

Teori investasi dari Tobin menyatakan bahwa stok kapital dan investasi yang diinginkan berhubungan positif dengan q , yaitu rasio antara nilai pasar (*market value*) dari modal terpasang perusahaan dengan biaya penggantian (*replacement cost*) modal terpasang perusahaan tersebut. Secara sederhana, q adalah rasio antara nilai pasar perusahaan dengan biaya penggantian modal.

6.6 Macam-macam Investasi dalam Ekonomi Makro

Dalam teori ekonomi makro yang dibahas adalah investasi fisik. Dengan pembatasan tersebut maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal. Stok barang modal adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian pada saat tertentu.

1. Investasi Dalam Bentuk Barang Modal dan Bangunan

Yang tercakup dalam investasi barang modal dan bangunan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian pabrik, mesin, peralatan produksi, bangunan/gedung yang baru. Karena daya tahan modal dan bangunan umumnya lebih dari setahun, seringkali investasi ini disebut sebagai investasi dalam bentuk harta tetap (*fixed investment*).

Di Indonesia, istilah yang setara dengan *fixed investment* adalah Pembentukan Modal Tetap Domestic Bruto (PMTDB). Supaya lebih akurat, jumlah investasi yang perlu diperhatikan adalah investasi bersih yaitu PMTDB dikurangi penyusutan.

2. Investasi Persediaan

Perusahaan seringkali memproduksi barang lebih banyak daripada target penjualan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Tentu saja investasi persediaan diharapkan meningkatkan penghasilan/keuntungan. Persediaan barang tersebut dikatakan sebagai investasi yang direncanakan atau investasi yang diinginkan karena telah direncanakan. Selain barang jadi, investasi dapat juga dilakukan dalam bentuk persediaan barang baku dan setengah jadi.

6.7 Nilai Waktu dari Uang

1. Nilai Sekarang (*Present Value*)

Nilai nominal dari sejumlah mata uang belum tentu akan lebih berharga dimasa datang. Hal ini sangat tergantung dari tingkat pengembalian investasi yang diinginkan.

$$V = X(1+r)^t$$

Ket: V = Nilai yang akan datang

X = Nilaisekarang

T = Waktu

r = Faktor diskonto

2. Nilai Masa Mendatang (*Future Value*)

Menghitung nilai masa mendatang adalah kebalikan dari menghitung nilai sekarang dari *output* investasi yang direncanakan. Sekalipun melihat dari sudut pandang yang bertolak belakang, keputusan yang dihasilkan tetap sama.

$$F = A (1+r)^t$$

Ket: F = nilai masa mendatang yang diharapkan

A = investasi awal

T = waktu

R = faktor diskonto

6.8 Kriteria Investasi

1. *Payback Period*

Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan, atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek, proposal investasi dianggap makin baik. Kendatipun demikian, kita harus berhati-hati menafsirkan kriteria *payback period* ini. Sebab ada investasi yang baru menguntungkan dalam jangka panjang (> 5 tahun).

2. *Benefit/Cost Ratio (B/C Ratio)*

B/C ratio mengukur mana yang lebih besar, biaya yang dikeluarkan dibanding hasil (*output*) yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan dinotasikan dengan C (cost). *Output* yang dihasilkan dinotasikan dengan B (*benefit*). Keputusan menerima atau menolak proposal investasi dapat dilakukan dengan melihat nilai B/C. Umumnya, proposal investasi baru diterima jika $B/C > 1$, sebab berarti *output* yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

4. *NetPresent Value* (NPV)

Perhitungan dengan menggunakan nilai nominal dapat menyesatkan, sebab tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Untuk membuat hasil lebih akurat, maka nilai sekarang didiskontokan. Keuntungan dari menggunakan metode diskonto adalah kita dapat langsung menghitung selisih nilai sekarang dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Selisih inilah yang disebut *netpresent value*. Suatu proposal investasi akan diterima jika $NPV > 0$, sebab nilai sekarang dari penerimaan total lebih besar daripada nilai sekarang dari biaya total.

5. *Internal Rate of Return* (IRR)

Internal rate of return adalah nilai tingkat pengembalian investasi, dihitung pada saat NPV sama dengan nol. Keputusan menerima/menolak rencana investasi dilakukan berdasarkan hasil perbandingan IRR dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan (r).

6.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Investasi

1. Tingkat Pengembalian yang Diharapkan (*Expected Rate of Return*)

a. Kondisi Internal Perusahaan

Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan, seperti tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi. Sedangkan faktor non-teknis, seperti kepemilikan hak dan atau kekuatan monopoli, kedekatan dengan pusat kekuasaan, dan penguasaan jalur informasi.

b. Kondisi Eksternal Perusahaan

Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi utama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional.

2. Biaya Investasi

Hal yang paling menentukan adalah tingkat bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya minat akan investasi makin menurun. Namun tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total investasi masih tinggi dan faktor yang mempengaruhi adalah masalah kelembagaan.

BAB VII

TEORI IS – LM

7.1 Asumsi Dan Kegunaan

Pada prinsipnya model IS-LM adalah, merupakan pengembangan dari model silang Keynes tentang penentuan pendapatan nasional. Model IS-LM tersebut dikemukakan pertama kalinya oleh Sir John R Hicks (1937) dan kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Alvin Hansen (1949). Oleh karena itu, model IS-LM sering juga disebut model Hick-Hansen. Model IS-LM ini memiliki beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Perekonomian hanya terdiri atas dua sektor yaitu sektor riil dan sektor moneter. Dengan perkataan lain model IS-LM menekankan interaksi pada pasar barang dan pasar uang. Untuk perekonomian terbuka asumsi ini dengan sendiri akan dimodifikasi.
2. Tingkat bunga memainkan peranan yang penting baik dipasar barang maupun dipasar uang. Dengan perkataan lain tingkat bunga disini merupakan faktor penghubung antara pasar barang dan pasar uang.
3. Pengeluaran konsumsi bergantung pada pendapatan disposable.
4. Permintaan investasi bergantung pada tingkat bunga dan pendapatan.
5. Pengeluaran pemerintah bersifat eksogen.
6. Tingkat harga diasumsikan ditentukan secara eksogen.
7. Permintaan akan uang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan tingkat bunga.

8. Jumlah uang beredar bersifat eksogen, dimana besarnya ditentukan oleh otoritas moneter.

Model IS-LM menjelaskan bagaimana tingkat bunga dan *output* total yang dihasilkan di dalam perekonomian ditentukan, pada suatu tingkat tertentu yang tetap. Model IS-LM tidak hanya bermanfaat karena dapat digunakan di dalam peramalan ekonomi, tetapi juga bermanfaat karena model IS-LM ini menyediakan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan pemerintah itu mempengaruhi kegiatan ekonomi agregat. Model IS-LM dapat membantu para pembuat kebijakan dalam memprediksikan dampak dari suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Terhadap pendapatan atau *output* agregat (Y) dan tingkat bunga (i), misalnya apabila pemerintah menaikkan pengeluaran (G), atau menambah jumlah uang beredar (M_s) didalam perekonomian. Dalam hal ini, analisis IS-LM memungkinkan kita untuk menjawab sejumlah pertanyaan penting menyangkut kegunaan atau keefektifan dari kebijakan fiskal dan moneter dalam mempengaruhi tingkat aktifitas ekonomi.

7.2 Pasar Barang: Kurva IS-LM

Adapun yang dimaksud dengan pasar barang adalah pasar untuk barang-barang dari jasa-jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan kurva IS adalah kurva yang menggambarkan berbagai titik kombinasi antara tingkat bunga (i) dan tingkat pendapatannya (Y), dimana pasar barang berada pada keseimbangan. Singkatnya, kurva IS adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang.

1. Penurunan Kurva IS

Didalam model Keynes sederhana tentang pasar barang dan jasa, keseimbangan pasar akan terjadi apabila dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

- a. Penawaran agregat barang-barang dan jasa (Y) = permintaan agregat akan barang-barang dan jasa (AD) atau $Y = C + I + G$.
- b. Tabungan ditambah pajak = investasi ditambah pengeluaran pemerintah atau $S + T = I + G$

2. Struktur Perekonomian

- a. Perekonomian Tertutup dimana perekonomian dianggap tidak melakukan transaksi dengan luar negeri / asing. Sehingga variabel-variabelnya adalah Y, C, I, S, G . sehingga keseimbangan pada pasar barang $Y = C + I + G ; I=S$
- b. Variabel-variabel Perekonomian tertutup dengan kebijakan Fiskal adalah $I + G + Tr = S + Tx$
- c. Sedangkan untuk perekonomian terbuka variabel – variabelnya adalah Y, C, I, S, G, X , dan M sehingga keseimbangan $Y = C + I + G + X - M$.
- d. Variabel-variabel Perekonomian terbuka dengan kebijakan Fiskal adalah $Yd = I + G - Tr + Tx + X - M$

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurva IS

1. Bilangan pengganda (multiplier). Besar kecilnya pengganda mempengaruhi baik *intercept* maupun *slope* dari fungsi IS. semakin besar pengganda maka *intercept* dan *slope* kurva IS juga akan semakin besar pula. Sedangkan besar-kecilnya pengganda itu sendiri

dipengaruhi oleh kecenderungan mengkonsumsi marginal (MPC) atau b elastisitas investasi terhadap pendapatan (f).

2. Kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian (*consumer and business confidence*) kepercayaan konsumen dan dunia bisnis terhadap perekonomian masing-masing dicerminkan oleh perubahan dan peubah konsumsi otonom (a) dan peubah Investasi otonom (I_0) Perubahan yang terjadi pada dua peubah ini akan mempengaruhi *intercept* dari kurva IS, yang berarti kalau a dan I_0 meningkat, maka kurva IS akan bergeser kekanan dan sebaliknya kurva IS akan bergeser ke kiri apabila terjadi penurunan pada salah satu dari kedua peubah tersebut.

3. Kepekaan investasi terhadap perubahan dalam tingkat bunga (*interest elasticity of Investment*). Hal ini dicerminkan oleh konstanta v dalam persamaan diatas. semakin peka Investasi terhadap perubahan tingkat bunga, maka slope kurva IS akan semakin curam, sedangkan *intercept*-nya adalah tetap atau tidak berubah. sebaliknya, semakin tidak sensitive investasi terhadap tingkat bunga, maka kemiringan kurva IS akan semakin datar, elastisitas investasi terhadap tingkat bunga hanya mempengaruhi *slope* kurva IS saja, dan tidak akan menyebabkan kurva IS bergeser.

4. Kebijakan pemerintah (*fiscal policy*) Perubahan didalam peubah kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah (G) dan pajak (T) akan mempengaruhi *intercept* kurva IS, tetapi tidak berpengaruh terhadap slope kurva IS. Dengan perkataan lain perubahan dalam peubah kebijakan fiskal (G dan T) hanya akan menyebabkan kurva IS bergeser, tetapi *slope* kurva IS tetap. Kebijakan fiskal sebenarnya dapat mempengaruhi kemiringan (*slope*) kurva IS, kalau pajak dipungut pemerintah adalah pajak pendapatan, dimana tarif pajak akan

mempengaruhi pengganda, dan selanjutnya pengganda akan mempengaruhi baik intercept maupun *slope* kurva IS yang bersangkutan.

7.3 Kurva IS Hipotetik Perekonomian Indonesia

Seperti telah kita ketahui untuk perekonomian tertutup tanpa kebijakan fiskal, kurva IS dapat kita turunkan dengan menggunakan salah satu persamaan di bawah ini:

$$I(r) = S(Y)$$

$$Y = CM + I(r)$$

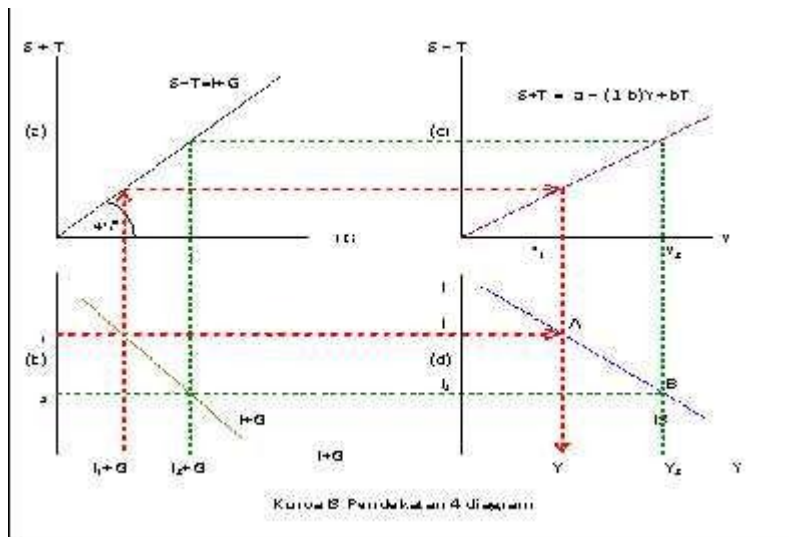
Dari kedua persamaan ini masing-masing akan dapat dihasilkan persamaan fungsi IS yang sama. Perekonomian kita merupakan perekonomian terbuka yang mana kebijakan fiskal juga sangat besar peranannya. Dengan demikian berarti bahwa persamaan kurva IS yang lebih tepat untuk perekonomian kita adalah persamaan kurva IS yang diturunkan dari persamaan berikut:

$$Y = C(Y+Tr-Tx) + I(r) + G + X - Z(Y + Tr - Tx) + \dots$$

dengan variabel-variabel berikut:

X = nilai ekspor

Z = nilai impor



1. Diagram I menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan jumlah investasi.
2. Diagram II menunjukkan keseimbangan di pasar barang dimana $S = I$
3. Diagram III menunjukkan fungsi tabungan
4. Diagram IV menunjukkan kurva IS yaitu kurva yang menghubungkan antara titik-titik tingkat bunga dan pendapatan nasional

Contoh Soal:

Diketahui:

$$C = 80 + 0,6Y$$

$$I = 100 - 10i$$

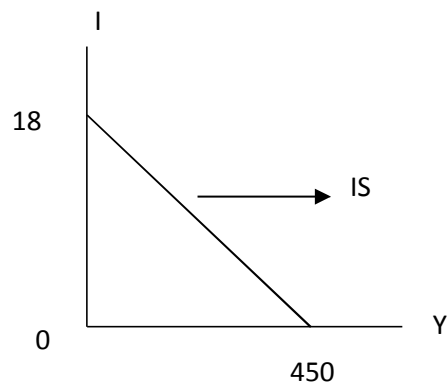
Maka,

$$Y = C + I$$

$$Y = 80 + 0,6Y + 100 - 10i$$

$$0,4Y = 180 - 10i$$

$$Y = 450 - 25i$$



Jadi :

Pada saat

$i = 0$ maka $Y = 450$

$Y = 0$ maka $25i = 450$

$i = 18$

7.4 Pasar Uang

Pasar uang akan berada dalam keadaan seimbang apabila apabila *Supply for Money*/penawaran akan uang (M_s) sama dengan *Demand for Money* / permintaan akan uang (M_d). Kurva LM adalah titik-titik yang menghubungkan antara tingkat bunga (i) dan pendapatan nasional (Y).

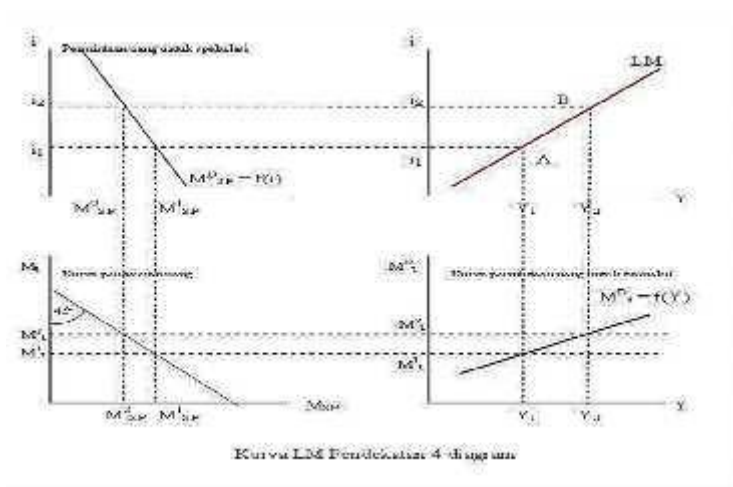
Teori permintaan uang menurut Keynes:

1. Motif transaksi
2. Motif berjaga-jaga
3. Motif spekulasi

Permintaan uang untuk bertransaksi / besar kecilnya jumlah uang yang diminta untuk bertransaksi dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan. Kebutuhan uang untuk bertransaksi di simbolkan dengan L_t , dimana;

L = Uang Liquid

T = untuk Transaksi



7.5 Kurva LM Hipotetik Perekonomian Indonesia

Dalam bentuknya yang standar kurva LM mempunyai bagian yang inelastik sempurna yang biasa disebut daerah Klasik dan kemudian disusul dengan bagian yang elastisitas tingkat bunganya lebih besar daripada nol akan tetapi lebih kecil daripada tidak terhingga, yaitu bagian yang biasa disebut *intermediate range* atau daerah tengah dan akhirnya bagian dengan elastisitas tingkat bunga yang besarnya tidak terhingga yang biasa disebut daerah jerat likuiditas atau *liquidity trap range*.

Menurut dugaan kita perekonomian kita sampai dewasa ini kurva LM-nya tidak memiliki bentuk standar seperti yang digambarkan di atas. Sekalipun dalam perekonomian kita telah ada Pasar Modal namun transaksi yang terjadi boleh dikatakan masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah uang yang beredar ataupun terhadap besarnya pendapatan nasional yang terjadi. Mengadakan jual-beli surat-surat berharga atau dengan perkataan lain menyimpan kekayaan dalam bentuk surat-surat obligasi atau surat-surat saham boleh dikatakan

belum membudaya secara luas dalam masyarakat kita. Dengan demikian mudah kiranya dipahami dugaan bahwa peranan para spekulasi surat-surat berharga terhadap jalannya perekonomian kita sebagai suatu keseluruhan adalah sangat kecil. Mendasarkan kepada kenyataan seperti ini, dapatlah kiranya diduga pula bahwa kurva permintaan akan uang untuk motif spekulasi berimpit dengan sumbu tingkat bunga.

Ungkapan yang lebih sederhana dapat pula dikatakan bahwa perekonomian kita belum mengenal fungsi L_2 , berimpitnya kurva L_2 dengan sumbu tingkat bunga mempunyai makna bahwa uang yang beredar dalam perekonomian semuanya terpakai sebagai uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga. Dengan ketentuan-ketentuan seperti ini maka kurva LM berbentuk garis lurus sejajar dengan sumbu tingkat harga. Yaitu persis seperti kurva LM yang diturunkan dengan menggunakan asumsi Klasik. Dengan kurva permintaan akan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga OL_1 , maka dengan jumlah uang yang beredar sebanyak OM_1 , kurva LM yang dihasilkan terlihat sebagai kurva $YILM_1$ dan dengan jumlah uang yang beredar sebanyak OM_2 , kurva LM yang terbentuk ialah kurva $YDLM_2$.

Selanjutnya perlu diketengahkan di sini bahwa untuk perekonomian yang tidak mengenal fungsi L_2 tersebut kuadran barat Jaya dan barat laut dapat dihilangkan karena tidak relevan lagi. Semua uang yang beredar seluruhnya tersedia untuk L_1 . Ini berarti sumbu vertikal kuadran tenggara di samping kita pakai sebagai fungsi L_1 , juga kita pakai untuk menunjukkan jumlah uang yang beredar.

Keseimbangan IS-LM

Pasar Barang (IS)

1. $C = 5.000 + 0,80Y_d$
2. $I = 500 - 4.000i$
3. $T_x = 250 + 0,30Y$
4. $G = 1.800$
5. $X = 2.000$
6. $M = 1.000 + 0,5Y$

Pasar Uang (LM)

1. $L_t = 0,15Y$
2. $L_j = 0,05Y$
3. $L_s = 500 - 2.000i$
4. $M = 5.000$

Hitung persamaan harga di pasar barang dan pasar uang?

Jawab: $Y = C + I + G + (X - M)$

$$\begin{aligned} Y &= 5.000 + 0,80(Y - 250 - 0,30Y) + 1.800 + 2.000 + 1.000 + 0,5Y + \\ &500 - 4.000i \\ &= 9.800 + 0,80(Y - 250 - 0,30Y) + 0,05Y + 500 - 4.000i \\ &= 10.300 + 0,80Y - 200 - 0,24Y + 0,5Y - 4.000i \\ &= 10.100 + 0,56Y + 0,5Y - 4.000i \end{aligned}$$

$$Y - 0,61Y = 10.100 - 4.000i$$

$$0,39Y = 10.100 - 4.000i$$

$$Y = 25.89744 - 10.256i$$

Keseimbangan di pasar uang

$$M = L_t + L_j + L_s$$

$$5.000 = 0,15Y + 0,05Y + 500 - 2.000i$$

$$5.000 = 0,20Y + 500 - 2.000i$$

$$4.500 + 2.000i = 0,20Y$$

$$Y = 22.500 + 10.000i$$

7.6 Pasar uang Kurva LM

Secara umum yang dimaksud dengan pasar uang adalah pasar dimana uang atau dana jangka pendek dipinjam atau dipinjamkan atau tempat dimana akan terjadi interaksi antara penawaran uang dan permintaan uang yang pada akhirnya menentukan tingkat bunga.

Adapun yang dimaksud dengan permintaan uang atau jumlah uang yang diminta (M.) adalah jumlah uang yang orang atau masyarakat berencana untuk memegangnya ditangan pada suatu waktu tertentu dalam keadaan tertentu.

Dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of e\|Employment, Interest and Money* (1936), Keynes mengemukakan ada tiga motif yang mendorong seseorang atau masyarakat untuk memegang uang tunai yaitu:

1. Motif untuk transaksi yaitu permintaan uang untuk melaksanakan transaksi pembelian barang-barang dan jasa-jasa sehari-hari.
2. Motif berjaga-jaga yaitu permintaan uang untuk menghadapi hal-hal yang bersifat tak terduga.
3. Motif spekulasi yaitu permintaan uang untuk menghadapi ketidakpastian menyangkut nilai uang dari asset-aset lain yang dapat dimiliki seseorang.

7.7 Penawaran Agregatif

Setelah kita memperbincangkan unsur-unsur permintaan agregatif, yaitu fungsi IS dan fungsi LAI, kita sekarang beralih memperhatikan segi penawaran agregatifnya. Seperti halnya dengan fungsi IS dan fungsi LM yang tidak kita olah lebih lanjut menjadi fungsi atau kurva permintaan agregatif, mengenai unsur-unsur penawaran agregatifnya

juga tidak kita olah sampai menghasilkan fungsi atau kurva penawaran agregatif.

Sumbu horisontal kita gunakan untuk mengukur besar-kecilnya kapasitas produksi nasional, sumbu vertikal kita gunakan untuk mengukur besar-kecilnya stok kapital nasional. Kalau pada awal periode 1 besarnya stok kapital nasional menunjukkan jumlah sebesar OK1, maka untuk periode I perekonomian memiliki kapasitas produksi nasional sebesar OQm_1 . Apabila selama periode 1 dalam perekonomian terjadi imycstasi neto sebesar k_1k_2 . stok kapital nasional pada akhir periode 1 atau awal periode 2 menunjukkan angka sebesar OK2. Dengan stok kapital nasional sebesar OK2. tersebut dan dengan garis *capital-output-ratio* yang berlaku OCOR, kapasitas produksi nasional untuk periode 2 meningkat menjadi sebesar OQm_2 . dengan memperhatikan antara lain kenyataan-kenya-taan seperti di bawah ini:

1. Jumlah penduduk terus meningkat. Ini berarti angkatan kerja untuk perekonomian kita juga terus meningkat dari tahun ke tahun.
2. Stok kapital per kapita untuk perekonomian kita masih rendah. Ini mempunyai makna bahwa sumber daya modal kita dapat kita anggap sebagai masih langka, sedangkan sumber daya manusia yang kita miliki dapat dikatakan berkelebihan, dalam arti lebih dari seimbang dibanding-kan dengan stok kapital nasional yang ada.
3. Tingkat harga dalam perekonomian kita boleh dikatakan tidak pernah menurun. Keadaan seperti ini dapat diduga terus berlangsung paling tidak dalam beberapa dasawarsa mendatang; maka kiranya cukup beralasan bagi kita untuk menggunakan asumsi bahwa besarnya kapasitas produksi nasional OQm sekaligus merupakan variabel penawaran agregatif yang kita cari ,

mengingat akan tidak adanya kemungkinan untuk menu-runnya tingkat harga yang berarti, maka dengan menggunakan model analisis yang telah kita kuasai, kita tidak mempunyai cukup alasan untuk menggunakan kurva penawaran agregatif dengan bentuk yang menyerupai bentuk huruf "J" seperti yang diturunkan dari asumsi mazhab Keynes.

BAB VIII

APBN DAN APBD

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penganggaran disektor pemerintahan merupakan suatu proses yang kompleks dan panjang serta tidak dapat dilepaskan dari sektor politis. Kompleksitas disebabkan karena belum adanya kesempatan yang dapat diterima semua pihak tentang bagaimana pengalokasian sumber dana pemerintah secara tertib. Ketidakkesepakatan tersebut antara lain disebabkan masalah politis, adanya nilai-nilai kepemimpinan yang berbeda diantara pengambil keputusan, serta adanya perdebatan tentang bagaimana suatu sistem penganggaran dapat memuaskan semua pihak yang terkait maka alokasi anggaran sekarang didasarkan kepada target kinerja.

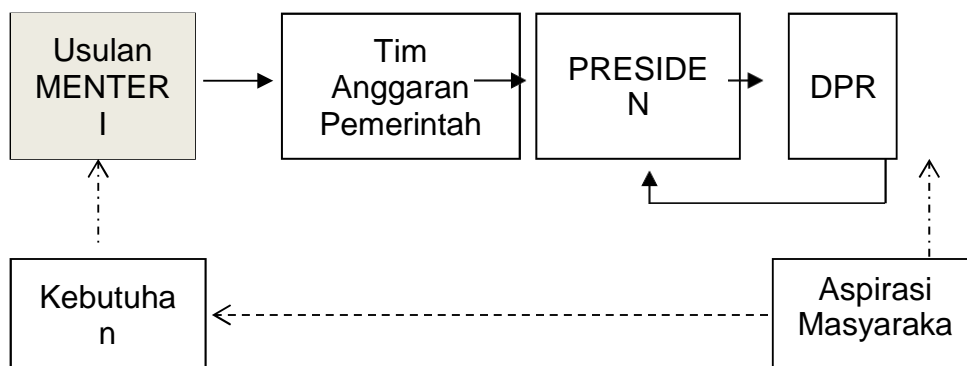
Perubahan pendekatan ini tentunya menuntut adanya perubahan paradigma dari aparat pemerintah baik yang pusat maupun daerah, karena setiap dana yang dialokasikan dalam APBN maupun APBD harus dapat terukur kinerjanya, dengan kata lain tidak ada alokasi anggaran apabila tidak jelas kinerjanya.

8.1 Pengertian dari APBD & APBN

APBD adalah (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun. Secara

umum APBD disusun untuk memperoleh gambaran lebih dalam tentang kondisi keuangan pusat/daerah serta menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan dan memperkirakan kondisi keuangan di masa depan. APBD disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan daerah dari penerimaan yang direncanakan supaya mendapat sasaran yang ditetapkan, antara lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

APBN adalah (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.



8.2 Dasar hukum

1. Pra Kemerdekaan

Sejak 1903, dalam sistem keuangan publik yang ada, selain keuangan Negara mulai dikenal pula sitem keuangan daerah, yang

menentukan pembentukan daerah otonom, namun system keuangan yang digunakan masih belum jelas.

2. Pasca Kemerdekaan

Sejak Indonesia merdeka, diberlakukan UUD 1945. Hal keuangan mulai diatur dalam Pasal 23 Bab VIII UUD 1945. Sistem keuangan daerah juga mulai dinyatakan dalam UU No 1. Tahun 1945 tentang peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Dari berbagai literature yang ada, dapat disimpulkan pada umumnya sebelum tahun 2001 bentuk anggaran yang dikenal di Indonesia adalah T-Account.

3. Reformasi

Pada masa reformasi bentuk T-Account dalam anggaran diubah menjadi I-Account untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem dan standar klasifikasi anggaran internasional. Bentuk anggaran berdampak pada perubahan prinsip anggaran yang dianut. Negara smakin memantapkan sistem keuangan republik Indonesia. Yang diamanatkan dalam UU tersebut seperti berikut:

- a. Belanja Negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja (dari masing-masing program dan kegiatan).
- b. Penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*).
- c. Klasifikasi anggaran berstandar internasional (*I-Account*).
- d. Anggaran belanja terpadu (*unified budget*).
- e. Penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*).

8.3 Fungsi dari APBN

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

3. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
7. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
 - a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
 - b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
 - c. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

- d. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- e. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
- f. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- g. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

8.4 Penyusunan APBD

Proses penyusunan APBD terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif, sebagai berikut:

1. Proses di Eksekutif

Penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD, sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemda. Proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan).

2. Proses di legislatif

Penyusunan APBD di tingkat legislatif dilakukan berdasarkan Tatib DPRD yang bersangkutan.

8.5 Komposisi APBD

Pendapatan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan kewenangan tugas dan tanggung jawab yang jelas .

8.6 Prinsip APBD & APBN

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

1. Kesatuan: Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas: Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan : Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu
4. Spesialitas: Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akrual: Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas
6. Kas: Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke Kas Daerah

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran.

Prinsip Anggaran Negara

1. Prinsip Anggaran APBN
2. Prinsip Anggaran dinamis
3. Prinsip Anggaran Fungsional

Sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit.

1. Prinsip Anggaran Defisit

Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan:

- a. Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan melainkan sebagai sumber pembiayaan.
- b. Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN + sumber pembiayaan LN (bersih)

Anggaran Defisit

$$\text{PNH} - \text{BN} = \text{DA}$$

$$\text{DAP} = \text{AP} - \text{TP}$$

$$\text{PbDN} = \text{PkDN} + \text{Non-Pk DN}$$

$$\text{PbLN} = \text{PPLN} - \text{PC PULN}$$

Keterangan:

PNH = pendapatan negara dan hibah

BN = belanja negara

DA = defisit Anggaran

PbDN = pembiayaan DN

PkDN = Perbankan DN

Non-PkDN = Non-Perbankan DN

PbLN	=	pembiayaan LN
PPLN	=	penerimaan pinjaman LN
PCPULN	=	pembayaran cicilan pokok Utang luar Negeri
BLN	=	bantuan luar negeri

Anggaran Berimbang

$$\text{PDN} - \text{PR} = \text{TP}$$

$$\text{DAP} = \text{AP} - \text{TP}$$

Keterangan:

PDN = Pendapatan DN

PR = Pengeluaran Rutin

TP = Tabungan Pemerintah

DAP = Defisit Anggaran Pembangunan

AP = Anggaran Pembangunan

2. Prinsip Anggaran Dinamis

Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif.

- a. Anggaran bersifat dinamis absolut apabila Tabungan Pemerintah (TP) dari tahun ke tahun terus meningkat.
- b. Anggaran bersifat dinamis relatif apabila (TP) terus meningkat atau prosentase ketergantunganprosentase kenaikan (TP) pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun.

3. Prinsip Anggaran Fungsional

- a. Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan/ pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan

(pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin.

- b. Prinsip ini sesuai dengan azas “bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap” dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan/ pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin besar fungsionalitas anggaran

8.7 Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah

Hubungan antara pusat dan daerah sejak UU No 5. Tahun 1947 sebenarnya sudah berpijak pada tiga asas desentralisasi, antara lain dekonsentrasi desentralisasi, dan tugas pebantuan. Hubungan antar pusat dan daerah pada akhirnya tercermin pada pembagian.

8.8 Kebijakan Fiskal Nasional

Kebijakan fiskal nasional adalah merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi berdasarkan jenisnya. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu penstabil otomatis dan kebijakan fiskal diskresioner.

1. Penstabil Otomatik

Penstabil otomatis itu antara lain pajak proposional dan pajak progresif, asuransi pengangguran, dan kebijakan harga minimum.

2. Kebijakan Fiskal Diskresioner

Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya

dengan tujuan untuk mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat kegunaan tenaga kerja yang tinggi terdapat dua macam alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankannya yaitu:

Membuat perubahan-perubahan atas pengeluarannya dan membuat perubahan-perubahan atas pajak yang di pungutnya.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak yang berlaku dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Tarif pajak proposional
- b. Tarif pajak progresif
- c. Tarif pajak regresif
- d. Tarif pajak tetap

4. Peranan Kebijakan Fiskal

- a. Anggaran surplus
- b. Anggaran defisit
- c. Anggaran seimbang atau berimbang

8.9 Tujuan dari APBN & APBD

Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat. APBN/ APBD memang dirancang oleh pemerintah, namun harus mendapat persetujuan DPR. Proses penyusunan APBD terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif, sbb:

1. Proses yang terjadi di Eksekutif

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD, sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemda. Proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan).

2. Proses di legislative

Proses penyusunan APBD di tingkat legislatif dilakukan berdasarkan Tatib DPRD yang bersangkutan.

8.10 Contoh Masalah APBN & APBD di Indonesia Tahun 2011

Korupsi tidak akan pernah bisa kita pisahkan dari apa yang dinamakan kekuasaan. Di mana ada kekuasaan, pasti ada korupsi. Hal ini telah menjadi kodrat dari kekuasaan itu sendiri, yang menjadi “pintu masuk” bagi terjadinya tindakan korupsi. Kekuasaan dan korupsi yang selalu berdampingan, layaknya dua sisi mata uang, merupakan hakikat dari pernyataan yang disampaikan oleh Lord Acton, dari Universitas Cambridge, “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*”.

Sesuai dengan definisinya, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan etis formal yang dilakukan oleh seseorang dalam posisi otoritas publik (penguasa). Korupsi cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atau wewenang terhadap sesuatu. Apabila seseorang tersebut tidak memiliki kuasa, kecil kemungkinan bagi dirinya untuk melakukan

korupsi. Namun, merupakan suatu kemustahilan bagi manusia yang tidak memiliki sebuah ‘kekuasaan’. Selain itu, ciri paling utama dari korupsi adalah tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi semata dan merugikan pihak lain di luar dirinya.

Contoh paling mudah adalah seorang mahasiswa yang bolos kuliah dan meminta temannya untuk mengisi buku hadir. Sejatinya, ia telah melakukan korupsi karena ia memiliki kuasa terhadap kehadiran dan ketidakhadiran dirinya di dalam kelas. Dia melakukan tindakan tersebut untuk kepentingannya sendiri.

Melihat konteks kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, korupsi kelas kakap, merupakan korupsi serius yang merugikan negara dan masyarakat banyak. Korupsi yang dimaksud ini juga tidak lepas dari masalah kekuasaan. Para pejabat publik telah dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan melanggar hukum untuk kepentingan pribadi. Seorang pejabat publik yang memegang kekuasaan (memiliki wewenang) secara otomatis memiliki daya untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan.

Sesuai dengan sifat dari kekuasaan (kekuasaan politik) itu, yaitu mengendalikan tingkah laku manusia (masyarakat) secara koersif (memaksa) agar supaya masyarakat bersedia tunduk kepada negara (pemerintah). Dalam hal ini, setiap kebijaksanaan yang diberlakukan sejatinya merupakan sebuah ketentuan atau aturan yang sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Dari sini lah peluang untuk terjadinya tindakan korupsi besar sekali.

Mengacu pada kasus korupsi Andi Achmad, Bupati Lampung nonaktif, dapat dijelaskan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh Andi Achmad itu dapat terlaksana karena dia memiliki suatu kekuasaan

dan wewenang. Seperti yang kita ketahui bahwa Andi sebagai Bupati memegang jabatan sebagai posisi tertinggi tingkat kabupaten. Posisi yang demikian sangat memudahkannya untuk memanipulasi data, mempengaruhi suatu kebijakan sehingga ia dapat meraup keuntungan yang besar untuk dirinya sendiri. Menurut sumber Media Indonesia, modus Andi melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan wewenangnya bermacam-macam. Dari perkara-perkara seperti ini lah Andi Achmad berhasil mendapatkan keuntungan tersebut. Dia memiliki kepintaran dan kelihaihan yang merupakan 'senjata' dari sebuah kekuasaan dan kewenangan.

Manusia memiliki sifat dasar untuk terus mengonsumsi, atau paling tidak memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, besar kemungkinan tuntutan-tuntutan pribadi tetap membayangi manusia di dalam melaksanakan kewajibannya, yang seharusnya kewajiban itu menuntut seseorang untuk dapat berperilaku bersih dan mengutamakan kepentingan umum dan tanggung jawab. Hal ini pula yang menimpa Gayus Tambunan. Ada kecurigaan bahwa kasus korupsi, penggelapan dan pencucian uang disebabkan oleh suap yang dilakukan oleh para pengusaha agar mau memudahkan jalan bagi usaha mereka. Seperti misalnya ketika Gayus menerima aliran duit sebesar Rp. 370 juta. Selain itu, ada keterlibatan pengusaha bernama Andi Kosasih dalam kasus korupsi Gayus Tambunan. Korupsi yang merugikan negara dan masyarakat banyak biasanya bermula dari penguasa.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, antara lain adalah korporatisme. Korporatisme, dalam khasanah literature ekonomi-politik, sering disepadankan dengan praktek politik di mana pemerintah atau penguasa berinteraksi secara tertutup (tidak diketahui

oleh masyarakat) dengan sektor swasta besar (pengusaha kelas kakap). Dalam ketertutupan tersebut, transaksi ekonomi maupun politik terjadi hanya untuk kepentingan segelintir kelompok kepentingan (interest group) yang terlibat di dalamnya. Biasanya transaksi politik maupun ekonomi yang seperti ini terjadi secara informal dalam tatanan hukum yang kabur atau tatanan hukum yang memihak kepentingan kelompok kecil tersebut. Adanya persengkongkolan seperti ini membuka peluang besar bagi hukum untuk dipermainkan (mafia hukum) sehingga hukum seorah-olah telah dipegang oleh tangan-tangan tertentu.

Sistem korporatisme akan menimbulkan ketidakstabilan dan rakyat menjadi pihak yang dirugikan. Dalam prakteknya, korporatisme biasanya berbarengan dengan praktek-praktek haram lainnya yang disebut dengan *rent seeking* (memburu sewa) yang dilakukan oleh para elite penguasa atau pun keluarga di lingkup elite. *Rent seeking* dalam prakteknya adalah menjualbelikan jabatan publik yang dimiliki oleh pejabat publik guna memperoleh keuntungan ekonomi, yang prakteknya berwatak “koruptif”. Praktek-praktek seperti ini dapat dilihat jelas pada masa Orde Baru, yang pada saat itu terjadi distribusi modal yang hanya dinikmati segelintir orang atau pengusaha (yang umumnya adalah keluarga Soeharto) dan terdapat praktek monopoli dalam produksi.

Seperti yang disampaikan oleh Amien Rais tentang empat tipe korupsi, secara jelas bahwa bagaimanapun tindakan korupsi itu, tidak akan lepas dari apa yang namanya persengkongkolan (korporasi) antara penguasa (penguasa merupakan pihak pertama yang pada awalnya membuka akses untuk terjadinya kecurangan) dengan para pengusaha (sektor swasta, yang berpotensi memberikan rangsangan kepada

penguasa untuk membuka akses kemudahan bagi pelanggaran hukum). Korupsi atau kejahatan korporasi juga didorong oleh pengaruh hasrat dan ketamakan dari dalam diri seseorang (dalam hal ini adalah penguasa), serta tuntutan keluarga (korupsi nepotistik).

Korupsi merupakan *white-collar crime*. Merujuk kepada pengertian *white-collar crime* yang menunjukkan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat, sesungguhnya kasus korupsi Gayus Tambunan sangat dapat dilihat dari pisau bedah ini.

Yang pertama sekali harus diperhatikan adalah kata “orang terhormat” tersebut. Bisa jadi ini dapat menimbulkan pengertian yang bias tentang status Gayus Tambunan yang hanyalah seorang pegawai rendah di kantor pusat pajak.

Oleh karena itu, penulis lebih menekankan pengertian *white-collar* ini sebagai istilah yang memiliki makna pada awal kemunculannya, yang digunakan oleh Sloan, yaitu *white-collar* yang menunjuk kaum penerima gaji yang mengenakan pakaian yang bagus-bagus dalam pekerjaannya, seperti karyawan administrasi kantor, para manajer dan para asistennya. Dari sini, Gayus termasuk dalam kategori yang dimaksudkan.

Tipologi dari *white-collar crime* yang dibuat oleh Clinard dan Quinney (1973) adalah *occupational criminal behavior* dan *corporate criminal behavior*. Dua tipologi ini kemudian dibagi menjadi lima tipe ciri pelaku dan tujuan, yaitu;

1. Pelanggaran individu sebagai individu,
2. Pelanggaran pegawai terhadap majikan,

3. Pelanggaran pejabat pembuat kebijakan untuk kepentingan umum,
4. Pelanggaran agen korporasi terhadap kepentingan umum, dan
5. Pelanggaran oleh pedagang terhadap konsumen

Kejahatan korupsi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang terhormat tadi. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh individu sebagai individu, atau pegawai terhadap majikannya (kasus penggelapan). Melihat secara sepintas kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus, tindakannya termasuk dalam kategori ini, yaitu dilakukan oleh individu sebagai individu demi keuntungan yang dinikmati oleh individu. Namun demikian, adanya dugaan keterlibatan para pengusaha lain, seperti Andi Kosasih, dan para petinggi dari Kepolisian, menjadikan kasus korupsi Gayus (makelar kasus) sebagai bentuk dari kejahatan korporasi (dilakukan oleh organisasi, dalam bentuk struktur organisasi yang saling menguntungkan dan melindungi, serta melempar tanggung jawab).

Aksi seperti ini termasuk dalam tipe 3 dan tipe 4 yang disampaikan oleh Clinard dan Quinney, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pembuat kebijakan untuk kepentingan majikan atau pihak tertentu; pelanggaran yang dilakukan oleh agen korporasi terhadap kepentingan umum. Berkaitan dengan hal ini, pengusaha memanfaatkan posisi Gayus untuk mempermudah prosedural pengurusan pajak, dan bahkan melibatkan pihak kepolisian untuk menutupi kecurangan yang telah dilakukan.

Prof. Muhammad Mustofa, memberikan penjelasan tentang teori yang digagas oleh Sutherland, berkaitan dengan kasus korupsi ini. Sutherland menganalisa dan menjelaskan gejala *white-collar crime*

dengan menggunakan teori *different association*. Sutherland menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya melakukan pelanggaran hukum, tetapi bukan merupakan kelanjutan dari kenakalan yang pernah dilakukan pada masa anak atau remaja. Konsep ini menunjukkan bahwa mereka berasal dari kalangan atas yang berpendidikan. Ketika para pelaku ini belajar masalah bisnis, pada saat itu pula lah mereka belajar tentang bagaimana cara melakukan pelanggaran hukum (dalam *different association* dikatakan bahwa kejahatan didapat dari proses belajar). Konsep bisnis dihayati sebagai sikap untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan segala cara. Dalam melakukan bisnis ini, sering terjadi penyelewengan hukum demi kelancaran jalannya bisnis. Penyimpangan sengaja dilakukan untuk meningkatkan keuntungan. Misalnya pelaku usaha yang sengaja membuat iklan terlalu berlebihan dan menyesatkan (terdapat unsur kebohongan) agar konsumen mau membeli produk mereka. Hal ini merupakan sebagian kecil dari banyak contoh yang memperlihatkan bentuk kecurangan dalam perilaku bisnis. Biasanya dalam melakukan kecurangan, pelaku bisnis jarang sekali mendapatkan kritik dari media massa, karena sejatinya media massa juga merupakan palaku bisnis. Para pelaku bisnis terbebas dari kritik dan terbebas dari kemungkinan diajukan ke pengadilan karena mereka mempunyai hubungan yang erat dengan birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Begg, David, Stanley Fischer, & Rudiger Dornbusch. 2001. *Principles of Macroeconomics 2nd ed.* USA: Harcourt College Publishers
- Billas, Richard A. 1998. *Microeconomic Theory 2nded.* Singapore: Mc Graw-Hill.
- Boediono. 2001. *Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Edisi 4.* Yogyakarta: BPFE.
- Case & Fair. 2007. *Prinsip-prinsip Ekonomi Jilid I.* Jakarta: Erlangga.
- Case & Fair. 2007. *Prinsip-prinsip Ekonomi Jilid II.* Jakarta: Erlangga.
- Evans, M.K. 2004. *Macroeconomics for Managers.* Australia: Blackwell Publishing Ltd.
- Iskandar, P. 2000. *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mankiw, Gregory. 2009. *Principles of Economics: Pengantar Ekonomi Mikro.* Jakarta: Salemba Empat.
- McEachern, William A. 2009. *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer Edisi Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. 2001. *Macroeconomics.* 17th edition. New York: The McGraw-Hill Company Inc.
- Slavin, Stephen L. (1999), *Macroeconomics 5th edition.* New York, The McGraw-Hill Company.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Ekonomi Makro Edisi 3.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahuja, H.L. 2002. *Macroeconomics, Theory and Policy 9th edition.* New Delhi: Rajendra Ravindra Printer.
- Andolfatto David. 2005. *Macroeconomic Theory and Policy Preliminary Draft.* Simon Fraser University.

- Krueger, Dirk. 2012. *Macroeconomic Theory*. University of Pennsylvania : Department of Economics.
- Sodikin, Akhmad. 2007. *Variabel Makro Ekonomi Yang Mempengaruhi Return Saham Di Bej*. STIE Miftahul Huda Subang.
- Hamzah, Ardi. 2005. *Analisa Ekonomi Makro, Industri Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Beta Saham Syariah*. Solo: Magister Sains UGM.
- Prishardoyo, Bambang. 2008. *Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005*. Malang :Universitas Negeri Semarang
- Eric. R. Dogde. 2013. *5 Steps To Macro Economics*. Mic Grow Hill : USA.
- John Duffy. 2014. *Experiments In Macro Economics*. Emerald : USA
- John E. Marthinsen. 2015. *Managing In Global Economy : Demystifying International Macro Economy Second Edition*. Cengage Learning : USA
- Wendy Carlin & David Soskice. 2015. *Institution, Instability, and the Financial System*. Online Resource Centre : New York

GLOSARIUM

APBD adalah (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun.

APBN adalah (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Ekonomi makro atau **makro-ekonomi** adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro-ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian.

Internal rate of return adalah nilai tingkat pengembalian investasi, dihitung pada saat NPV sama dengan nol.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah (negara) untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya roda perekonomian agar dapat dikembangkan iklim usaha yang baik,

Kebijakan Moneter: kebijaksanaan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengawasi jumlah penawaran uang dalam masyarakat.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.

Pasar Barang adalah pasar untuk barang-barang dari jasa-jasa.

Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan, atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun.

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari

Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari bantuan luar negeri yang dinyatakan dalam rupiah dan terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek.

Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga.

PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu

Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun.

Teori Moneter adalah: analisa mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan akan uang (*demand for money*) dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penawaran akan uang (*supply of money*).

INDEKS

- Aliran interaksi perekonomian empat sektor, 45-47
- Aliran pendapatan dan pengeluaran, 35
- Alur perekonomian dua sektor, 21
- Anggaran Belanja Seimbang (*Balance Budget Approach*), 34
- Asumsi dan kegunaan teori IS-LM, 70-71
- Contoh Masalah APBN & APBD, 89-94
- Dasar hukum, Pra kemerdekaan, 81
- Pasca kemerdekaan, 81
- Reformasi, 81-82
- Demand Deposit*, 7
- Demand for Money*, 6
- Departemen/Lembaga, 4
- Diposible Income*, 11
- Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan, 40-41
- Equilibrium, 9
- Faktor yang mempengaruhi Konsumsi, 62-63
- Faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, Tingkat pengembalian yang diharapkan, 69
- Biaya Investasi, 69
- Fungsi APBN, Fungsi otorisasi, 82
- Fungsi perencanaan, 82-83
- Fungsi pengawasan, 83
- Fungsi alokasi, 83
- Fungsi distribusi, 83
- Fungsi stabilisasi, 83
- Fungsi APBD, 83-84
- Fungsi Konsumsi dan Tabungan, 28-29
- Fungsi Konsumsi, 60
- Hubungan antara keuangan pusat dan daerah, 87-88
- Hubungan Antara Konsumsi dan Pendapatan, 22
- Investasi finansial, 3
- Investasi, 29-30, 64
- Teori investasi dari Keynes, 64
- Teori akselerator, 64-65
- Teori dana internal, 65

Teori neoklasik, 66

Teori q dari Tobin, 66

Jenis Pajak,
Berdasarkan pihak yang menanggung:
Pajak Langsung, 37
Pajak Tak Langsung, 37
Berdasarkan pihak yang memungut:
Pajak Negara, 38
Pajak Daerah, 38
Berdasarkan sifatnya:
Pajak Subjektif, 38
Pajak Objektif, 39

Kebijakan Dalam Masalah Ekonomi Makro,
Kebijakan fiskal, 42
Kebijakan moneter, 43
Kebijakan segi penawaran, 43
Kebijakan energi, 43
Kebijakan penetapan harga, 43
Kebijakan neraca pembayaran, 43
Kebijakan fiskal nasional,
Penstabil otomatis, 88
Kebijakan fiskal diskresioner, 88

Tarif pajak, 88

Peranan kebijakan fiskal, 88
Kebijakan fiskal,
Kebijakan fiskal pasif, 10
Kebijakan fiskal yang disengaja, 10
Kebijakan Moneter, 34
Kecondongan menabung marjinal,
Average Propensity to Save, 25
Marginal Propensity to Save, 25
Kecondongan mengkonsumsi marjinal,
Average Propensity to Consume, 23
Marginal Propensity to Consume, 23
Keseimbangan pendapatan nasional, 47-51
Keseimbangan Perekonomian Negara, 31-32
Keseimbangan tingkat konsumsi, 64
Keuangan Negara, 80
Komplemen, 4
Komposisi APBD, 84-85

Konsep Harga Uang, 6
 Kriteria investasi,
Payback period, 68
Benefit/Cost ratio, 68
Net Present Value, 68
Internal Rate of Return, 68-69
 Kuantitatif arah, 2
 Kurva IS hipotetik
 perekonomian Indonesia, 73
 Kurva LM hipotetik
 perekonomian Indonesia, 75
 Macam-macam investasi dalam
 ekonomi makro,
 Investasi dalam bentuk barang
 modal dan bangunan, 66
 Investasi persediaan, 67
Means of Exchange, 7
Measure of Value, 7
 Metode Pendapatan, 15
 Metode Produksi, 14
 Multiplier dalam perekonomian
 terbuka, 51
 Multiplier dalam perekonomian
 tiga sektor, 42
Nett National Income, 11
Nett National Product, 11
 Nilai waktu dari uang,
 Nilai sekarang (*present value*),
 67
 Nilai masa mendatang (*future
 value*), 67
 Ortodoks, 6
 Pasar barang: Kurva IS-LM, 71
 Pasar uang kurva LM, 77-78
 Pasar Uang, 74
 PDB per Kapita dan Masalah
 Produktivitas, 19
 Pembiayaan Fungsional
 (*Functional Finance*), 34
 Penawaran agregatif, 78-78
 Pendapatan Nasional, 11
 Pengelolaan Anggaran (*Manage
 Budget Approach*), 34
 Pengertian dari APBD &
 APBN, 80
 Penghitungan multiplier secara
 aljabar, 52-53
 Peningkatan Tingkat Kegiatan
 Ekonomi, 30-31
 Penyusunan APBD,
 Proses di Eksekutif, 84
 Proses di Legistalif, 84

Peran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor, 33-34

Perekonomian dua sektor, 21

Perekonomian empat sektor, 44

Perekonomian tiga sektor, 33

Perhitungan PDB dan Analisa Kemakmuran, 17

Perhitungan PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak Tercatat (*underground economic*), 20

Perhitungan PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial, 18

Personal Income, 11

Prinsip anggaran negara,

Prinsip anggaran defisit, 86-87

Prinsip dinamis, 87

Prinsip fungsional, 87

Prinsip APBN & APBD,

Prinsip kesatuan, 85

Prinsip universalitas, 85

Prinsip tahunan, 85

Prinsip spesialisitas, 85

Prinsip Akrual, 85

Prinsip Kas, 85-86

Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*), 11

Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*), 11

Produk Nasional Bruto, 2

Stabilisasi Anggaran, 34

Stabilitas harga, 8

Standar Barang (*Commodity Standard*),

Standar Emas (*The Gold Standard*), 7

Standar for Deferred Payment, 7

Standar Kembar (*The Gold and Silver Standard*), 7

Standar Kepercayaan (*Fait Standard*), 8

Standar Perak (*The Silver Standard*), 7

Store of Value, 7

Store of Wealth, 7

Teori keseimbangan umum, 6

Teori Konsumsi dan Investasi, 54

Teori Konsumsi,

Teori Keynes – *Absolut Income Hypothesis*, 54-55

Teori *Simon Kuznets* – Konsumsi jangka panjang, 55

Teori *Duessenberry* – *The relative income hypothesis*, 56

Teori Milton Friedman – *Permanent income hypothesis*, 57-58

Teori *Franco Modigliani* – *Life cycle hypothesis*, 58-60

Teori moneter, 6

Teori perilaku konsumen, 6

Teori perilaku produsen, 6

Teori permintaan uang menurut Keynes,

Motif transaksi, 74

Motif berjaga-jaga, 74

Motif spekulasi, 74

Tujuan dari APBN & APBD, 89

Unsur Pajak,

Subjek Pajak, 39

Objek Pajak, 39

Tarif Pajak, 39-40

BIODATA PENULIS



Cakti Indra Gunawan dilahirkan dari seorang Ibu yang hebat bernama Rr. Sri Rejeki dan Ayah, Mino, seorang Pegawai Negeri Departemen Keuangan (Pajak). Penulis lahir di Purwokerto Jawa Tengah Indonesia, pada tanggal 14 Mei.

Penulis bersekolah di SDN Krandegan I Banjarnegara, SMPN 1 Purwokerto dan SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Setelah selesai sekolah, penulis melanjutkan studi S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Brawijaya, kemudian mengambil studi S2 Magister Manajemen di Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Dikarenakan keinginan belajar dan semangat pantang menyerah, maka pada tahun 2010 mendapatkan beasiswa studi ke luar negeri dari pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Dikti. Studi S3 (doktoral) di bidang Manajemen Migrasi Ketenagakerjaan Internasional dapat diselesaikan dengan penuh perjuangan di the University of New England (UNE), salah satu kampus yang unggul di Australia. Pada saat di Negeri Kanguru tersebut penulis mendapatkan beasiswa dari John Mackey dan beasiswa *travelling* seminar dari Kampus UNE. Penulis juga aktif di keorganisasian mahasiswa internasional sehingga banyak berkenalan dengan tokoh dan ilmuwan dari berbagai negara.

Saat ini banyak diminta untuk menjadi pembicara dan pemateri konferensi di berbagai kampus baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penulis mendirikan Lembaga Penelitian Internasional dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (International Research and

Development for Human Beings) – CV.IRDH, di mana lembaga/perusahaan ini telah bekerjasama dengan kampus dan expert di berbagai negara.

Penulis mengajar di Universitas Tribhuwana Tungadewi (UNITRI) baik program S1 dan S2 dan menjadi Ketua Jurnal Ekonomi, serta Pengelola S2 program Magister Manajemen UNITRI. Di samping itu penulis mengajar di Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Terbuka, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan berbagai kampus sebagai dosen terbang/luar biasa. Saat ini penulis telah menghasilkan 6 buku ajar mata kuliah untuk S1 samapai S3 dan buku ajar internasional 2 buah yang diterbitkan di The University of New England dan Jerman.

Harapannya ingin membantu para intelektual muda untuk bangkit memberikan Darma Bakti kepada Ibu Pertiwi agar Indonesia menjadi negara yang unggul di bidang ilmu pengetahuan seperti Nusantara pada saat jaman Majapahit dan jaman *The Lost of Atlanctic*. Penulis mempunyai semboyan, “Menaklukan Dunia Melalui Ilmu Pengetahuan”.